



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERKEMBANGAN KETERLIBATAN PEREMPUAN  
DALAM POLITIK PRANCIS  
1945-2007**

**SKRIPSI**

**CININTA ARYADINI  
NPM: 0606088961**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA  
PROGRAM STUDI PRANCIS  
DEPOK  
JULI 2011**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERKEMBANGAN KETERLIBATAN PEREMPUAN  
DALAM POLITIK PRANCIS  
1945-2007**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Humaniora

**CININTA ARYADINI  
NPM: 0606088961**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA  
PROGRAM STUDI PRANCIS  
DEPOK  
JULI 2011**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiarisme, saya bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Depok,



Cininta Aryadini

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber, baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama: Cininta Aryadini

NPM: 0606088961



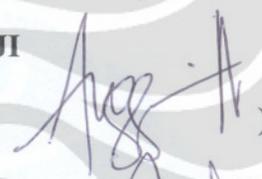
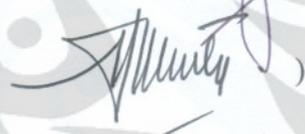
Tanggal: 20 Juli 2011

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang diajukan oleh :  
Nama : Cininta Aryadini  
NPM : 0606088961  
Program Studi : Prancis  
Judul : Perkembangan Keterlibatan Perempuan dalam Politik Prancis 1945-2007

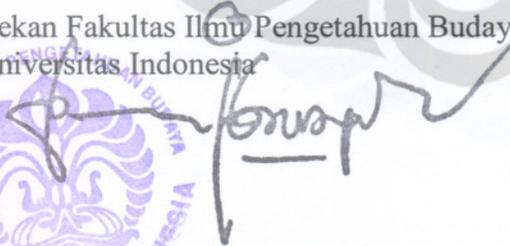
Skripsi ini telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Program Studi Sastra Prancis Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Ari Anggari Harapan M.Hum (  )  
Penguji : Prof. Dr. M.I Djoko Marihandono (  )  
Penguji : Dr. Risnowati Martin (  )  
Ditetapkan di : Depok  
tanggal : 18 Juli 2011

oleh

Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya  
Universitas Indonesia

  
Dr. Bambang Wibawarta S,s, M.A  
NIP. 196510231990031002

## UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Humaniora Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.

Banyak sekali pihak yang mendukung saya selama proses penulisan skripsi ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Ibu Ari Anggari Harapan M.Hum, selaku pembimbing skripsi. Terima kasih telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk skripsi saya. Dan maaf juga karena selama ini saya sering ganti topik bahasan yang mungkin membuat bingung.
- (2) Bapak Prof. Dr. M.I Djoko Marihandono dan Ibu Dr. Risnowati Martin, selaku pembaca skripsi yang memberi masukan dan saran bagi tugas akhir saya.
- (3) Bapak Tito W. Wojowasito, M.A, yang memberikan banyak masukan bagi saya.
- (4) Ibu Dr. Renny Sjahrul Azwar, selaku pembimbing akademis, yang telah membimbing saya hingga lulus.
- (5) Ibu Susi, selaku 'dokter' saya. Selalu memberi nasihat dan saran yang membuat saya semangat lagi.
- (6) Ibu Tuti Hardjayani, selaku 'penasihat' yang paling baik.
- (7) Keluarga saya: ayah, ibu, dan adik saya. Selalu memberi semangat dan doa. Ayah saya, Soepono Sasongko, dan ibu saya, Rahmani Astuti, yang selalu memberi dorongan, baik moral maupun material selama saya menuntut ilmu di luar kota, jauh dari rumah. Adik saya, Cintantya Sotya Ratri, yang paling cerewet tapi selalu membuat saya kangen rumah dan kangen berantem.
- (8) Mitra Kurnia S.T, yang selalu mendengarkan curhat dan cerita saya setiap hari. Selalu menguatkan dan memberi dorongan. Terima kasih atas kasih sayang dan perhatiannya selama ini.

(9) Bapak dan Ibu Kos, yang menyediakan tempat kos terbaik di Depok. Membuat saya betah kos dari awal hingga lulus. Keluarga kedua saya selama di perantauan.

Untuk teman-teman kos, terutama untuk teman ‘seperjuangan’ dan teman ‘galau’ sesama *skripsi-er*, Dita Yustisia (F.Psikologi 2007) “*Ayo, Dit, semangat skripsi. Gue udah lulus, nih. Tetap semangat tanpa teman galau, ya. Hehehe....*”. Juga kepada teman jalan dan teman kos yang setia berbagi curhat, Ririh Asih Priyahita (F. Hukum 2006). Tidak lupa ucapan terima kasih untuk Maria dan Stephanie (F.Hukum, 2008). Makasih, ya, untuk kursus kilat hukum dan perundang-undangan.

Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman-teman mahasiswa program studi Prancis 2006, 2007, dan 2008 yang menemani saya selama ini. Kalian memberi dorongan dan semangat pada saya. Terutama untuk Geng Plurk (Ratih, Vidi, Cuni, dan Vitagi Putri) tempat berbagi rahasia; teman diskusi, Jeanne Françoise; teman imut saya, Lusi Triana; teman makan di Kantin Teknik, Stella Anggraini; teman seperjuangan selama skripsi, Artha Paramitha, Muninta Lestari, Mutia Aisyah, dan Aisha Ayu, dan teman hotspot, Veronika, Wuri, dan Dhay.

Tidak lupa juga bagi keluarga BO Pers Suara Mahasiswa UI, tempat bermain, belajar, dan berteman. Ini semua membuat saya betah malam-malam di Pusgiwa. Terima kasih kalian telah memberikan pengalaman berorganisasi yang luar biasa.

Terakhir, untuk semua pihak yang terlibat selama proses skripsi hingga saya lulus. Mungkin tidak dapat saya sebutkan satu-persatu karena terlalu banyak. Terima kasih atas bantuannya.

Depok, 18 Juli 2011

Cininta Aryadini

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA  
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini,

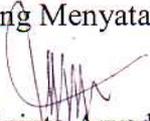
Nama : Cininta Aryadini  
NPM : 0606088961  
Program Studi : Prancis  
Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya  
Jenis Karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

PERKEMBANGAN KETERLIBATAN PEREMPUAN  
DALAM POLITIK PRANCIS 1945-2007

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmediakan, atau memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta tugas akhir saya ini dan pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Depok  
Tanggal 18 Juli 2011  
Yang Menyatakan  
  
(Cininta Aryadini)

## ABSTRAK

Nama : Cininta Aryadini

Program Studi: Prancis

Judul : Perkembangan Keterlibatan Perempuan dalam Politik Prancis  
1945- 2007

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa sejak diberi hak pilih partisipasi perempuan dalam kehidupan politik di Prancis terus meningkat. Penelitian ini memaparkan fakta-fakta politik secara deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah peran serta perempuan Prancis di politik meningkat.

Kata kunci:

Perempuan, keterlibatan, politik, Prancis

## ABSTRACT

Name : Cininta Aryadini

Studies Program : French Studies

Title : The Development of Women's Participation in French Politic  
1945-2007

The purpose of this thesis is to show that after having a suffrage from the French government, women's participation in political life of France increases constantly. This thesis explains the political facts descriptively. The conclusion of this research is the participation of French Women increased.

Key word:

Women, participation, politic, France

## RÉSUMÉ DU MÉMOIRE

Nom : Aryadini

Prénom : Cininta

Section : Française

Titre de la Mémoire : Le développement de la participation des femmes dans la politique française 1945-2007

Le mémoire a pour but de montrer qu'après avoir donné le suffrage, la participation des femmes dans la vie politique française augmente constamment. Ce thèse décrit les faits de la politique de façon descriptive. La conclusion est que la participation des femmes dans la politique française augmente.

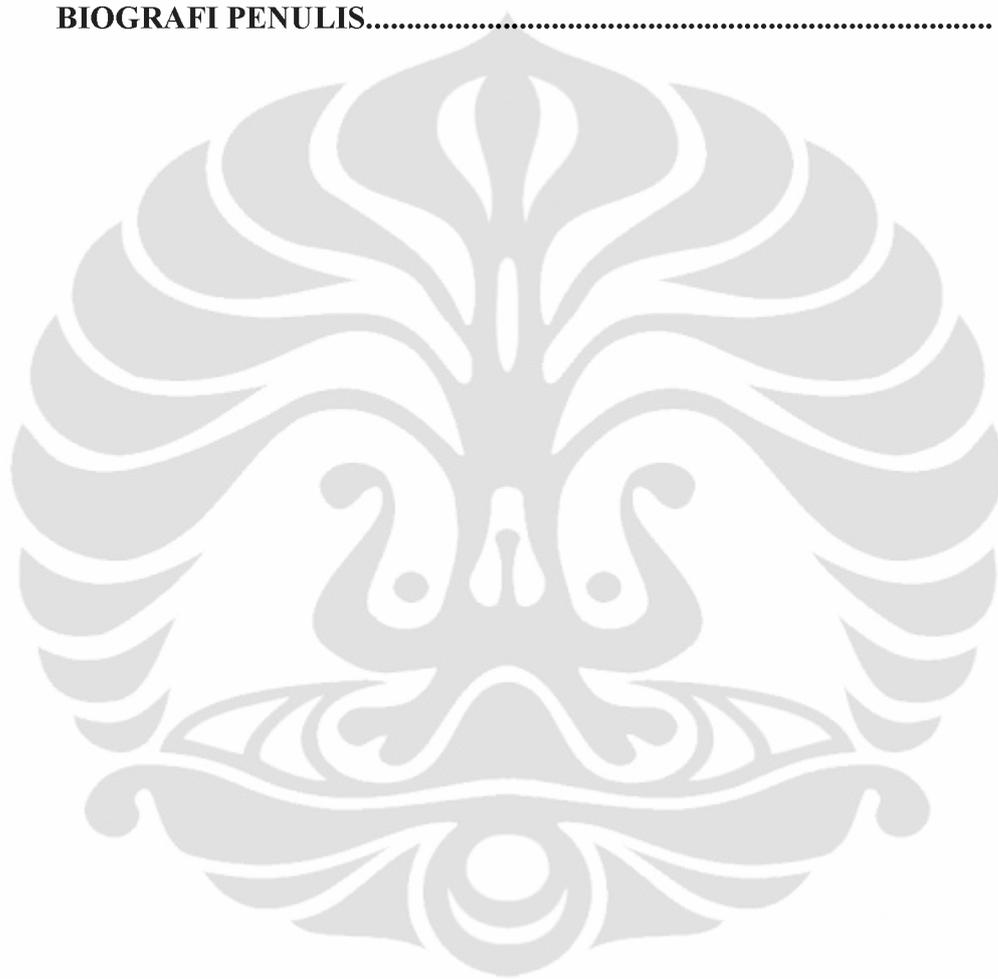
Mots-clé:

Femme, participation, politique, France

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iii</b>
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
LE RESUMÉ DU MÉMOIRE .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
<b>1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian .....	4
1.4 Ruang Lingkup Penelitian .....	5
1.5 Metodologi Penelitian .....	5
1.6 Sistematika Penulisan .....	8
<b>2. KERANGKA KONSEPTUAL .....</b>	<b>9</b>
2.1 Konsep Demokrasi .....	9
2.2 Lembaga Eksekutif dan Legislatif di Prancis .....	10
2.2.1 Lembaga Eksekutif Prancis .....	10
2.2.2 Lembaga Legislatif Prancis .....	12
a. Assemblée Nationale .....	12
b. Sénat .....	12
2.2.3 Partai-Partai Politik di Prancis .....	13
<b>3. KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM POLITIK PRANCIS</b>	
<b>TAHUN 1945-1981.....</b>	<b>17</b>
3.1 Keterlibatan Perempuan dalam Politik Prancis Masa Republik IV.....	19
3.2 Keterlibatan Perempuan dalam Politik Prancis Republik V: masa Presiden Charles de Gaulle, Georges Pompidou, dan Valéry Giscard d'Estaing .....	23
3.2.1 Masa Presiden Charles de Gaulle (1958-1969).....	23
3.2.2 Masa Presiden Georges Pompidou (1969-1974).....	26
3.2.3 Masa Presiden Valéry Giscard d'Estaing (1974-1981).....	29
<b>4. KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM POLITIK PRANCIS</b>	
<b>TAHUN 1981-2007 .....</b>	<b>34</b>
4.1 Keterlibatan Perempuan dalam Politik Prancis Masa Kekuasaan Partai Sosialis: Presiden François Mitterrand .....	35
4.1.1 Periode Pertama Presiden François Mitterrand (1981-1988).....	35

4.1.2 Periode Kedua	
Presiden François Mitterrand (1988-1995) .....	38
4.2 Keterlibatan Perempuan dalam Politik Prancis Masa	
Presiden Jacques Chirac (1995-2007).....	42
<b>5. KESIMPULAN .....</b>	<b>49</b>
<b>DAFTAR REFERENSI .....</b>	<b>52</b>
<b>BIOGRAFI PENULIS.....</b>	<b>65</b>



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perjalanan dilegalkannya perempuan Prancis memberikan suara dalam pemilihan umum (pemilu) sangat panjang. Prancis termasuk terlambat dibandingkan negara-negara Barat lainnya dalam melegalkan perempuan untuk memilih di pemilu. Perempuan di Finlandia memperoleh hak pilihnya sejak 1907, sementara Denmark sejak 1915, dan Inggris sejak 1928 ([http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/femmes/citoyennete\\_politique\\_chronologie.asp](http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/femmes/citoyennete_politique_chronologie.asp)). Sedangkan Prancis baru melegalkan perempuan sebagai pemilih dalam pemilu sejak 1944. Sebenarnya Prancis telah memulai pemilu sejak abad ke-14.<sup>1</sup> Saat itu sistem yang dipakai adalah *suffrage limité*<sup>2</sup> karena belum seluruh warga negara<sup>3</sup> memilih di pemilu.

Sistem ini berubah pada tahun 1848. Pemilu dapat diikuti oleh warga negara (*suffrage universel*), tanpa dikenakan syarat khusus, seperti membayar pajak (Goubert, 191). Prancis adalah negara pertama yang menerapkan *suffrage universel* (Hurtig, Massou-Laveau, dan Sineau, 2505). Meskipun demikian perempuan belum dapat memberikan suaranya.

Memasuki abad ke-20, partisipasi perempuan dalam pemilu di Prancis mulai dikaji di parlemen.<sup>4</sup> Tahun 1919 La Chambre des Députés mengkaji usulan undang-undang partisipasi perempuan dalam pemilu.<sup>5</sup> Dalam pemungutan suara

---

<sup>1</sup>Pemilu pertama kali diselenggarakan di Prancis pada awal abad ke-14 untuk memilih anggota *état généraux* (Viollet, 22)

<sup>2</sup>*Suffrage limité* yaitu pemilu yang pemilihnya dibatasi oleh aturan-aturan khusus. Mereka yang boleh memilih adalah warga Prancis yang memiliki hak dan kewajiban khusus.

<sup>3</sup>Sebelum konstitusi tanggal 27 Oktober 1946 yang dimaksud warga negara adalah pria (<http://www.vie-publique.fr/decouverteinstitutions/citoyen/approfondissement/definition-citoyennete-pays-occidentaux.html>)

<sup>4</sup>Parlemen adalah institusi yang terdiri dari satu atau beberapa majelis yang memiliki kekuasaan legislatif dan bertugas untuk mengontrol lembaga eksekutif. Di Prancis yang dimaksud parlemen adalah Assemblée Nationale dan Sénat (<http://www.larousse.fr/encyclopedie/nom-commun-nom/parlement/77077>)

<sup>5</sup>La Chambre des Députés adalah nama Assemblée Nationale yang digunakan selama Republik III (1875-1940) (<http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/histoire-1870.asp>)

anggota dewan, 95 anggota setuju sedangkan 329 anggota menentang usulan tersebut ([http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/femmes/citoyennete\\_politique\\_chronologie.asp](http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/femmes/citoyennete_politique_chronologie.asp)). dari hasil pemungutan suara tersebut, maka parlemen tidak mengeluarkan undang-undang yang melegalakan perempuan ikut memilih di pemilu.

Tanggal 7 April 1925 La Chambre des Députés kembali mengadakan pemungutan suara tentang partisipasi perempuan dalam pemilu. Kali ini usulan undang-undang yang diajukan adalah tentang partisipasi perempuan dalam pemilu tingkat *municipal* dan *cantonal*<sup>6</sup>. Sebanyak 389 anggota menyatakan setuju dan 140 anggota parlemen menolak usulan tersebut ([http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/femmes/citoyennete\\_politique\\_chronologie.asp](http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/femmes/citoyennete_politique_chronologie.asp)).

Pada tahun-tahun berikutnya usulan tentang undang-undang perempuan dalam pemilu terus menjadi perdebatan di Chambre des Députés. Terhitung sejak April 1925, anggota dewan melaksanakan empat kali pemungutan suara hingga tahun 1936, tentang boleh tidaknya perempuan berpartisipasi dalam pemilu ([http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/femmes/citoyennete\\_politique\\_chronologie.asp](http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/femmes/citoyennete_politique_chronologie.asp)). Setelah empat kali sidang, undang-undang tentang partisipasi perempuan pemilu belum disahkan.

Dalam ketidakpastian aturan tentang legalisasi partisipasi perempuan dalam pemilu, *président du conseil des ministres* Prancis saat itu, Léon Blum, justru memberi dukungan terhadap peran perempuan dalam pemilu. Ia menunjuk tiga orang perempuan sebagai *secrétaire d'état*. Mereka adalah Cécile Brunschvicg<sup>7</sup> mengurus bidang pendidikan nasional, Suzanne Lacore<sup>8</sup> dalam

<sup>6</sup> *Municipal* berhubungan dengan administrasi *commune*. *Commune* adalah sub-divisi administratif terkecil di Prancis. Sedangkan *cantonal* berhubungan dengan administrasi *canton*. *Canton* memiliki penduduk yang lebih sedikit dari *commune*. Kumpulan beberapa *canton* membentuk satu *commune*.

<sup>7</sup> Cécile Brunschvicg (1877-1946) adalah politikus Prancis yang aktif memperjuangkan hak-hak perempuan, khususnya dalam politik. Ia pernah menjabat sebagai ketua organisasi perempuan l'Union française pour le suffrage des femmes (USFS). Sebuah organisasi yang berdiri tahun 1909, aktif dalam memperjuangkan legalisasi partisipasi perempuan di pemilu. Brunschvicg menjabat dari tahun 1924-1946 (<http://bu.univ-angers.fr/EXTRANET/CAF/catalogue/Brunschvicg.html>).

<sup>8</sup> Suzanne Lacore (1875-1975) adalah seorang politikus perempuan Prancis. Lacore sebenarnya adalah seorang guru, tapi kemudian ia bergabung dengan partai SFIO dan aktif berpolitik. Lacore dikenal karena kerap menerbitkan tulisan tentang politik.

bidang kesehatan, dan Irène Joliot-Curie<sup>9</sup> dalam bidang ilmu pengetahuan (Hurtig, Massou-Laveau, dan Sineau, 2506).

Pada tahun 1943 untuk pertama kalinya Prancis memiliki anggota perempuan di *Assemblée Provisoire d'Alger*, yaitu Marthe Simard.<sup>10</sup> Pada tahun 1944 jendral Charles Charles de Gaulle, mendeklarasikan di hadapan *Assemblée Consultative Provisoire*, bahwa pemerintahan yang baru harus berisikan wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh warga Prancis, baik laki-laki maupun perempuan.

Pemungutan suara tentang partisipasi perempuan di pemilu dilakukan di *Assemblée Provisoire* pada bulan Januari 1944. Hal ini sekaligus menanggapi usulan tentang hak pilih bagi perempuan dari perwakilan *Parti Communiste Français (PCF)*, Fernand Grenier. Sebanyak 51 suara menyatakan setuju dan 16 suara menolak usulan tersebut ([http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/femmes/citoyennete\\_politique\\_chronologie.asp](http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/femmes/citoyennete_politique_chronologie.asp)). Akhirnya pada bulan April 1944 pemerintah Prancis mengeluarkan peraturan (*ordonnance*<sup>11</sup>) no.17 yang isinya memberikan hak kepada perempuan sebagai pemilih dalam pemilu.

Setahun setelah dikeluarkannya peraturan no.17 perempuan Prancis dapat memberikan hak suaranya pada pemilu tingkat *municipal* yang diselenggarakan tanggal 29 April sampai 13 Mei 1945<sup>12</sup>. Sementara pada tingkat nasional, pemilu legislatif untuk memilih wakil rakyat yang duduk di *Assemblée Constituante* diadakan pada tanggal 21 Oktober 1945. Dari hasil pemungutan suara ini 33

<sup>9</sup>Irène Joliot-Curie (1897-1956) adalah seorang ilmuwan Prancis, putri dari pasangan ilmuwan Pierre dan Marie Curie, serta istri dari ahli fisika nuklir Prancis, Frédéric Joliot. Ia pernah menjabat sebagai ketua Institut du Radium, Prancis tahun 1946. Bersama suaminya, ia mengembangkan radioaktif hingga memperoleh Nobel kimia tahun 1935 (<http://www.evene.fr/celebre/biographie/irene-joliot-curie-21042.php>)

<sup>10</sup>Pada masa Republik Vichy, *Comité Français pour la Libération Nationale (CFLN)* membentuk pemerintahan pengasingan Prancis di Aljazair (saat itu Aljazair masih wilayah Prancis). Pemerintahan ini dinamakan *Gouvernement Provisoire de la République Française (GPRF)*. Dalam pemerintahan pengasingan ini dibentuk pula *Assemblée Consultative Provisoire d'Alger* Hal ini terjadi karena pada tahun 1940-1944 Prancis dikuasai Jerman (<http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/gprf.asp#ACPAlger>)

<sup>11</sup> *Ordonnance* adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah, dengan persetujuan dari parlemen, dalam bidang yang kekuataannya di bawah undang-undang (<http://www.larousse.fr/encyclopedie/nom-commun-nom/ordonnance/75211>)

<sup>12</sup>Tahun 1944 Perang Dunia II masih terjadi di Eropa. Prancis saat itu masih dikuasai Jerman. Pemilu diadakan pada tahun 1945 setelah berakhirnya Perang Dunia II.

perempuan menjadi anggota *Assemblée Constituante* ([http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/femmes/citoyennete\\_politique\\_chronologie.asp](http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/femmes/citoyennete_politique_chronologie.asp)).

Dalam perkembangannya, jumlah perempuan yang terjun ke dunia politik Prancis terus bertambah. Mereka tidak hanya duduk sebagai wakil rakyat di *Assemblée Nationale*, namun menduduki posisi penting pada lembaga eksekutif. Bahkan pada tahun 1991-1992 Prancis memiliki perdana menteri perempuan pertama, Edith Cresson.

Beberapa perempuan juga mencalonkan diri sebagai kandidat presiden. Arlette Laguiller adalah perempuan pertama yang menjadi kandidat presiden pada pemilu tahun 1974. Kemudian muncul lagi nama-nama perempuan lainnya, seperti Marie France Garaud dan Hugutte Bouchardeau pada pemilu presiden tahun 1981, Dominique Voynet pada pemilu presiden tahun 1995, dan Corinne Lepage pada pemilu presiden 2002. Pada setiap pemilu presiden perempuan masuk sebagai kandidat, namun hanya sampai pada putaran pertama. Ségolène Royal adalah perempuan pertama yang berhasil melaju hingga putaran kedua pemilu presiden 2007.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Melihat latar belakang sebagaimana dipaparkan di atas, maka timbul pertanyaan bagaimana keterlibatan perempuan dalam kehidupan politik di Prancis.

## **1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa sejak diberikan hak untuk memilih dalam pemilu, keterlibatan perempuan dalam kehidupan politik di Prancis terus meningkat.

Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan tiga sasaran:

1. Memaparkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang terkait dengan peran perempuan dalam kehidupan politik di Prancis
2. Memaparkan kiprah tokoh-tokoh perempuan dalam kehidupan politik di Prancis
3. upaya-upaya yang dilakukan oleh beberapa organisasi perempuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik

#### **1.4 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini dibatasi oleh ruang lingkup temporal, tematis, spasial. Ruang lingkup temporal antara tahun 1945 hingga 2007. Tahun 1945 dipilih sebagai awal penelitian karena pada tahun ini karena pertama kali perempuan terpilih sebagai anggota legislatif di parlemen. Penelitian berakhir pada tahun 2007 karena pada tahun itu Prancis memiliki kandidat presiden perempuan pertama yang lolos hingga putaran kedua pemilu presiden Prancis.

Lingkup tematis yaitu politik Prancis. Khususnya pada perkembangan dan kehidupan politik Prancis. Penelitian ini terfokus pada keterlibatan perempuan dalam politik Prancis. Ruang lingkup spasial, yaitu Prancis. Pemilihan Prancis sebagai ruang lingkup spasial karena Prancis merupakan negara Eropa pertama yang mengamalkan demokrasi, namun Prancis terlambat, dibandingkan negara-negara Eropa lain, dalam melegalkan perempuan menjadi pemilih di pemilu.

#### **1.5 Metodologi Penelitian**

Metode penelitian menggunakan metode penulisan sejarah dari Shermant Kent (12-56). Dalam bukunya, *Writing History*, Kent membagi metode penelitian sejarah dalam empat tahap: menemukan topik yang tepat (*finding the perfect topic*), melakukan riset (*element of research*), menyusun sumber (*organizing materials*), dan yang terakhir adalah tahap penulisan (*writing*).

Menemukan topik yang tepat berarti mencari topik yang sesuai minat. Untuk itu harus mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai topik tersebut. Penelitian ini mengambil topik didasarkan pada partisipasi perempuan Prancis, khususnya dalam bidang politik, yang terus meningkat. Dikatakan meningkat

**Universitas Indonesia**

karena sejak keikutsertaan perempuan dalam pemilu tahun 1944, jumlah perempuan di bidang politik terus bertambah. Dalam kurun waktu sekitar enam puluh tahun, sejak diberi hak pilih, perempuan Prancis telah mencalonkan diri sebagai presiden. Presiden merupakan jabatan tertinggi dalam pemerintahan Prancis.

Riset dilakukan dengan mencari sumber-sumber data yang berhubungan dengan topik. Sumber-sumber yang akan digunakan haruslah sumber yang akurat dan dapat dipercaya. Sumber-sumber tersebut disesuaikan dengan topik penelitian, baik dari segi temporal, spasial, maupun tematis. Oleh karena itu perlu dilakukan verifikasi sumber.

Dalam penelitian ini verifikasi sumber telah dilakukan. Verifikasi dilakukan dengan mempertimbangkan penulis, judul sumber, tahun penerbitan, dan isi. Sumber berasal dari situs lembaga resmi pemerintah Prancis, seperti Assemblée Nationale, Sénat, kementerian luar negeri, kementerian ekonomi, juga situs resmi perdana menteri Prancis. Artikel dari surat kabar, seperti *The New York Times*, juga majalah Prancis, contohnya majalah *Elle*.

Tahap ketiga, menyusun informasi dari sumber. Tahap ini dilakukan dengan memilah informasi dari sumber data yang mendukung penelitian. Pemilahan informasi yang berhubungan dengan data tentang perempuan dalam politik Prancis. Informasi-informasi yang relevan dengan penelitian dirangkum dan digunakan sebagai bahan penulisan.

Informasi dari buku mengenai perkembangan peran serta perempuan di politik Prancis didapat dari tulisan Claire Duchon, *Women's Rights and Women's Lives in France 1944-1968* (1994). Sedangkan mengenai kehidupan politik Prancis pada Republik IV diambil dari tulisan Jacques Chapsal, *La Vie Politique en France de 1940 à 1958* (1993). Buku *French Political Parties*, tulisan N.A Addinall digunakan untuk menjelaskan partai-partai politik di Prancis serta ideologi yang dianut. Informasi tentang pemilu presiden serta kondisi politik sepanjang Republik V diperoleh dari buku karangan Michel Winnock, *L'élection présidentielle en France 1958-2007* (2008).

Sumber berupa jurnal yang digunakan dalam penelitian ini diunduh dari situs jurnal [www.jstor.org](http://www.jstor.org), [www.persee.fr](http://www.persee.fr), dan [www.cairn.info](http://www.cairn.info). Jurnal-jurnal

**Universitas Indonesia**

tersebut meliputi tulisan dari Danielle Haase-Dubosc berjudul *Sexual Difference and Politics in France Today* (Musim semi, 1999) yang diterbitkan oleh jurnal *Feminist Studies* vol. 25. Kemudian jurnal tulisan *Radical Theory: Organized Wome's Study in France, the Women's Movement and the State* yang ditulis oleh Judith Ezekiel (Musim Gugur, 1992) diterbitkan oleh jurnal *Women's Studies Quarterly* volume 20, *'Might it Right': Feminist Mouvement in France: Achivements and Shortcomings* diterbitkan oleh *Econmic and Political Weekly* vol.20 dan ditulis oleh Christiane Hurtig, Janine Mossus-Laveau, dan Mariete Sineau (November 1989). Dari Prancis, *Des quotas à la parité: "féminisme d'État" et représentation politique (1974-2007)* tulisan Laure Bereni dan Anne Reveillard yang diterbitkan di jurnal *Genèses*, tahun 2007.

Sumber internet didapat dari situs resmi Assemblée Nationale dan Sénat, [www.assemble-nationale.fr](http://www.assemble-nationale.fr), dan [www.senat.fr](http://www.senat.fr). Di samping itu informasi juga diperoleh dari situs resmi kementerian-kementerian Prancis. Dalam penelitian ini sumber berasal dari situs kementerian luar negeri Prancis ([www.diplomatie.gouv.fr](http://www.diplomatie.gouv.fr)), kementerian *service public* ([www.vie-publique.fr](http://www.vie-publique.fr)), dan lembaga Observatoire de La Parité ([www.observatoire-parite.gouv.fr](http://www.observatoire-parite.gouv.fr)).

Referensi dengan tahun penerbitan 2000-2007 didapat dari buku, jurnal, dan sumber internet. Sedangkan data mengenai tokoh-tokoh dalam lembaga eksekutif dan legislatif Prancis, juga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah<sup>13</sup> diperoleh dari situs resmi Assemblée Nationale, Sénat, dan situs resmi pemerintah Prancis tentang undang-undang, [www.legifrance.gouv.fr](http://www.legifrance.gouv.fr).

Tahap terakhir, yaitu penulisan. Pemaparan hasil penelitian ini dilakukan secara deskriptif. Penulisan deksriptif dilakukan dengan Fakta-fakta politik tersebut kemudian disimpulkan. Pemaparan secara kronologis dari awal penelitian, yaitu tahun 1944 hingga akhir penelitian tahun 2007. Pada tahap ini juga dilakukan analisis yang menghasilkan kesimpulan dari penjelasan yang telah dipaparkan pada penelitian ini.

---

<sup>13</sup>Termasuk dalam pemerintah adalah lembaga eksekutif yang terdiri dari presiden, perdana menteri, dan para menteri, atau pejabat setingkat menteri, atau wakil menteri

### 1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi dalam lima bab. Bab 1 merupakan pendahuluan. Sementara itu bab 2 berupa kerangka konseptual. Dalam bab 2 dipaparkan konsep demokrasi, lembaga eksekutif dan legislatif Prancis, serta partai-partai politik di Prancis. Bab 3 dan bab 4 merupakan pembahasan tentang keterlibatan perempuan dalam kehidupan politik di Prancis. Pembahasan dalam penelitian ini dibagi dalam dua bab yang menjelaskan secara kronologis tiap masa kekuasaan presiden karena setiap presiden memiliki kebijakan yang berbeda mengenai perempuan.

Bab 3 menjelaskan awal keterlibatan perempuan di politik Prancis, serta partisipasi perempuan sebelum kekuasaan presiden François François Mitterrand. Sedangkan pada bab 4 menjelaskan tentang peran serta perempuan di politik masa kekuasaan presiden François François Mitterrand dan setelah kekuasaan presiden François Mitterrand. Bab 5 merupakan kesimpulan tentang keterlibatan perempuan di politik Prancis.

## BAB 2

### KERANGKA KONSEPTUAL

Dalam bab 2 dibahas mengenai konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Penjelasan pada bab ini meliputi tiga konsep, yaitu konsep demokrasi, lembaga eksekutif dan lembaga legislatif Prancis, dan partai politik di Prancis. Penjelasan dalam bab 2 membantu pembahasan pada bab 3 dan bab 4.

#### 2.1 Konsep Demokrasi

Arti dari demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaannya berada di tangan rakyat (<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/157129/democracy>). Demokrasi merupakan unsur penting dalam sebuah negara. Prancis menerapkan demokrasi sejak ditetapkannya *Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen* tahun 26 Agustus 1789 (Nembrini, 87). Dalam perkembangan diterapkan di hampir semua negara di dunia.

Menurut Moten dan Islam, ada empat ciri demokrasi, yaitu (109-110):

1. Kekuasaan untuk membuat keputusan politik ada di tangan rakyat;
2. Setiap warga negara yang telah memiliki hak pilih mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi bidang politik
3. Keputusan publik dibuat melalui keputusan yang diambil oleh rakyat
4. Semua kebijakan politik diputuskan berdasarkan suara terbanyak

Dalam menjalankan demokrasi rakyat Prancis memilih wakilnya yang duduk di parlemen dan pemerintahan sesuai dengan amanat rakyat. Wakil-wakil rakyat dipilih melalui pemilu. Pemenang dari pemilu inilah yang bertugas untuk menyampaikan aspirasi rakyat lewat parlemen atau kabinet.

#### 2.2. Lembaga eksekutif dan legislatif di Prancis

Prancis menganut prinsip *trias politica* dalam penyelenggaraan negara<sup>14</sup>, yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga eksekutif terdiri dari

---

<sup>14</sup>Trias Politica adalah pembagian kekuasaan menurut fungsi. Dikemukakan oleh Montesquieu (1689-1755), seorang pemikir Prancis. Trias politica memisahkan kekuasaan menjadi tiga, yaitu

presiden, perdana menteri, dan para menteri. Lembaga legislatif bertugas untuk membuat undang-undang. Prancis menganut sistem *bicameralisme* atau dua kamar dalam lembaga legislatif. Lembaga legislatif pada Republik V terdiri atas dua lembaga, yaitu Assemblée Nationale, wakil-wakil politik di parlemen, dan Sénat yang anggotanya merupakan utusan daerah (de Gunthen, 42-47).

### 2.2.1 Lembaga Eksekutif Prancis

Prancis menganut sistem gabungan antara presidensial dan parlementer (*le système mixte*). Kepala negara adalah seorang presiden sedangkan kepala pemerintahan adalah seorang perdana menteri. Dalam sistem politik Prancis presiden dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum secara langsung. Masa jabatan presiden sebelum tahun 2000, adalah tujuh tahun. Sejak dilakukannya amandemen konstitusi Prancis yang didasarkan atas tahun 2000, jabatan presiden diubah dari tujuh tahun menjadi lima tahun.<sup>15</sup> Kebijakan ini mulai diterapkan pada pemilu presiden tahun 2002.

Sebelum diberlakukannya Konstitusi Republik V, sistem pemerintahan yang dianut Prancis terdiri atas lembaga eksekutif dan legislatif. Lembaga eksekutif terdiri dari presiden, *président du conseil*, dan para menteri (<http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/legislatures4rep.asp>; Hinnewinkel, et al, 89).<sup>16</sup> Presiden merupakan kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dijabat oleh *président du conseil*.

Sistem pemilihan presiden dilakukan secara tidak langsung oleh parlemen Prancis yang terdiri atas anggota Assemblée Nationale dan anggota Le Conseil de la République (Godechot, 391). Presiden dan memiliki fungsi protokoler di dalam dan luar negeri (Winnock, 16). Sedangkan *président du conseil* ditunjuk oleh presiden. Ia bertanggung jawab terhadap politik dalam negeri dan mempertanggungjawabkannya di hadapan Assemblée Nationale (Winnock, 16).

---

kekuasaan membuat undang-undang (legislatif), kekuasaan melaksanakan undang-undang (eksekutif), dan kekuasaan mengadaili pelanggar undang-undang (yudikatif) (Budiarjo, 151).

<sup>15</sup> Berdasarkan data referendum tanggal 24 September 2000 tentang pengurangan jabatan presiden dari tujuh tahun menjadi lima tahun, sebanyak 73,2% setuju dan 26,79% menolak (<http://www.france-politique.fr/referendum-2000.htm>)

<sup>16</sup> Istilah perdana menteri baru digunakan di Prancis pada masa Republik V

Berbeda dengan Republik IV, Republik V yang dimulai pada tahun 1958, membagi kekuasaan lembaga eksekutif di tangan presiden, perdana menteri, dan para menteri. Presiden bertugas untuk mengangkat pegawai tinggi pemerintah, mengesahkan undang-undang, dan merupakan panglima tertinggi Angkatan Bersenjata, serta ketua Dewan Menteri (*Conseils des Ministres*) (*Assemblée Nationale*, 22-28; de Guthen, 42-47).

Sedangkan perdana menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Perdana menteri dan para menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Pengangkatan para menteri dan perdana menteri harus atas persetujuan presiden. Ia bertanggung jawab terhadap pertahanan dalam negeri. Perdana menteri juga memiliki kuasa untuk menunjuk para menteri, mengusulkan rancangan undang-undang dan menjalankan rancangan undang-undang jika rancangan undang-undang telah disahkan menjadi undang-undang (*Assemblée Nationale*, 32-35).

Presiden memiliki hak prerogatif untuk menyusun kabinet. Dalam kabinet terdapat tingkatan jabatan menteri. Hal ini berlaku pada Republik IV dan Republik V. Jumlah menteri dan *secrétaire d'état* Perdana menteri adalah pemimpin dari kabinet. Para menteri ditunjuk Secara umum tingkatan jabatan menteri yang dibedakan menjadi empat, yaitu:

- *Ministre d'Etat* adalah jabatan yang diberikan kepada pimpinan partai atau mereka yang memiliki keahlian di bidang tertentu. Para *ministre d'Etat* bertugas sebagai kepala kementerian atau memiliki peran sebagai koordinator bidang tertentu (*Assemblée Nationale*, 30).
- *Ministre proprement dit* adalah jabatan yang setara dengan menteri. Bidang-bidang yang ditangani oleh *ministre proprement dit* antara lain ekonomi, edukasi, dan hukum. (de Guthen, 41; *Assemblée Nationale*, 30).
- *Ministre délégué* merupakan jabatan yang berada langsung di bawah perdana menteri. (de Guthen, 41; *Assemblée Nationale*, 31)
- *Secrétaire d'Etat* tidak termasuk dalam jajaran menteri. Jabatan ini dapat berupa pembantu menteri dapat pula sebagai jabatan otonom. Sebagai jabatan yang otonom *secrétaire d'Etat* memiliki kekuasaan tersendiri dan alokasi dana yang berbeda dengan menteri (de Guthen, 41; *Assemblée Nationale*, 31).

### 2.2.2 Lembaga Legislatif Prancis

Lembaga legislatif terdiri dari Assemblée Nationale dan Sénat. Assemblée Nationale anggotanya disebut *député*, yaitu wakil-wakil dari partai politik yang terpilih melalui pemilihan umum. Sementara Sénat beranggotakan wakil-wakil utusan daerah. Anggota Sénat disebut *sénateur*.

#### a. Assemblée Nationale

Assemblée Nationale merupakan lembaga legislatif yang bertugas untuk membuat undang-undang dan mengawasi kinerja pemerintah. Lembaga ini beranggotakan wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan langsung (*suffrage universel direct*). Assemblée Nationale berkedudukan di Palais Bourbon (Assemblée Nationale, 38). Sejak Maret 1986 jumlah *député* sebanyak 577 dengan rincian 555 mewakili Prancis *métropolitaine*, dan 22 *député* mewakili *departement d'outre-mer* (seberang lautan). Sebelum tahun 1986 jumlah *député* sebanyak 491 (de Guthen, 42).

Masa jabatan *deputé* adalah lima tahun, yang dipilih melalui pemilihan umum secara langsung. Jabatan selama lima tahun ini disebut *la législature*, yaitu masa jabatan legislatif. *Député* Assemblée Nationale dapat diberhentikan melalui keputusan presiden.

#### b. Sénat

Sénat adalah *assemblée* yang kedua di parlemen. Sénat juga disebut *chambre de réflexion*. Anggota Sénat disebut *sénateur*, yang dipilih melalui pemilihan tidak langsung (*indirect*) (de Guthen, 43). Tugas dari anggota Sénat sama dengan *député*, yaitu mengusulkan undang-undang, menetapkan anggaran pendapat dan belanja negara. Perbedaannya adalah anggota Sénat tidak memiliki hak untuk mengeluarkan mosi tidak percaya kepada pemerintah.

Sénat beranggotakan 343 senator (348 orang pada tahun 2011) (Assemblée Nationale, 39). Masa jabatan anggota Sénat adalah sembilan tahun, dengan pergantian sepertiga anggotanya setiap tiga tahun. Pergantian anggota Sénat dilakukan berdasarkan pada huruf pertama dari nama wilayah yang diwakilinya. Keanggotaan di Sénat berlangsung permanen. *Sénateur* tidak dapat diganti sebelum masa jabatannya usai. Sénat berkedudukan di Palais du Luxembourg (Assemblée Nationale, 39, de Guthen 43).

Pada masa Republik IV Sénat bernama Le Conseil de la République. Dibentuk tanggal 16 Juni 1946, Le Conseil de la République bertugas untuk menguji aturan atau undang-undang yang dibuat oleh Assemblée Constituante, membuat amandemen, dan mengajukan usulan peraturan ([http://www.senat.fr/histoire/coseil\\_republique.html](http://www.senat.fr/histoire/coseil_republique.html)).

Le Conseil de la République memiliki masa jabatan sembilan tahun dan diganti tiap tiga tahun. Dipilih oleh *collège électoral* yang terdiri dari perwakilan atau delegasi dari daerah pemilihan. Le Conseil de La République bertugas untuk memverifikasi undang-undang atau peraturan yang telah dibuat oleh Assemblée Constituante ([http://www.senat.fr/histoire/conseil\\_republique.html](http://www.senat.fr/histoire/conseil_republique.html)).

Pada Republik V anggota Sénat dipilih oleh *grands électeurs* yang berjumlah 150.000 orang atau lebih, tergantung dari rasio jumlah penduduk Prancis. Para pemilih anggota Sénat yang terdiri dari (Assemblée Nationale, 39):

- Para wakil rakyat yang duduk di *conseillers régionaux*, dan *conseillers généraux*<sup>17</sup>
- Perwakilan dari *conseillers municipaux* yang jumlahnya bergantung pada populasi dalam *commune*:
  - 1 sampai 15 perwakilan untuk *commune* yang jumlah penduduknya kurang dari 9000 orang
  - Anggota *conseillers municipaux* untuk daerah yang berpenduduk antara 9000 hingga 30.000 orang
  - Seluruh anggota *conseil municipal* ditambah satu perwakilan tambahan (yang dipilih oleh anggota *le conseil municipal*) untuk daerah berpenduduk lebih dari 30.000 orang

### 2.2.3 Partai-Partai Politik di Prancis

Menurut Ramlan Surbakti, partai politik adalah “kelompok anggota yang terorganisasi dengan rapi dan stabil, yang dipersatukan dan dimotivasi oleh suatu ideologi tertentu, dan yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilihan umum guna melaksanakan alternatif kebijakan umum yang mereka susun” (116). Dalam negara demokratis seperti

<sup>17</sup> Wilayah Corsica (Corse) dan Paris memiliki wakil khusus di Sénat

Prancis partai memiliki beberapa fungsi. Partai politik berfungsi untuk menjembatani rakyat dan pemerintah, menyampaikan rencana pemerintah kepada rakyat, dan memilih pemimpin politik (<http://www.france-allemande.fr/Les-partis-politiques-en-France,2360.html>).

Di Prancis penggolongan partai terbagi menjadi dua: kanan dan kiri. Partai kanan biasanya berhaluan liberal, sedangkan kiri biasanya merupakan partai dengan haluan komunis atau sosialis. Pengelompokan ini, berdasarkan sejarahnya, ditentukan dari tempat duduk anggota dewan Prancis di parlemen, yang dimulai pada sidang anggota dewan Paris tahun 1789. Saat itu mereka yang duduk di sebelah kanan raja adalah golongan royalis yang memihak raja. Mereka disebut golongan kanan. Sementara yang duduk di kiri raja adalah golongan revolusioner, yang menghendaki adanya pergantian sistem ketatanegaraan (Hinnewinkel et al, 97).

Kebiasaan ini berlanjut pada masa Republik IV dan Republik V. Partai-partai yang beraliran liberal duduk di sebelah kanan, sementara partai-partai sosialis dan komunis duduk di sebelah kiri. Pada masa Republik IV, Prancis memakai sistem *tripartisme*. Pada masa ini pemerintahan dan parlemen Prancis dikuasai tiga partai besar (Goubert, 301). Partai-partai tersebut adalah partai MRP (*Mouvement Républicain Populaire*) yang merupakan partai kanan. Sedangkan golongan kiri diwakili partai SFIO (*Section Française de l'Internationale Ouvrière*), dan Partai Komunis (*Parti Communiste-PC*).

Memasuki Republik V pengelompokan tiga partai besar ini tidak berlaku lagi. Hanya ada partai berdasarkan golongan kanan dan kiri. Awal Republik V partai yang mendominasi adalah UNR (*Union pour la Nouvelle République*). UNR merupakan partai politik yang dibentuk oleh Charles Charles de Gaulle. Pada masa Sementara itu partai kiri terdiri dari partai Komunis (PC), partai Sosialis, serta afiliasinya (Addinall, 28). Dalam perkembangan selanjutnya partai kanan di Prancis dengan istilah "*les droites*", adalah partai yang beraliran liberal atau republikan.<sup>18</sup> Sedangkan partai kiri disebut Prancis disebut "*les gauches*" adalah partai-partai beraliran sosialis atau komunis.<sup>19</sup>

<sup>18</sup>Liberal menekankan pada kebebasan individu, baik kebebasan bertindak maupun berpikir. Dalam hal politik dan ekonomi, paham liberal tidak memberi batas terhadap kepemilikan seseorang (<http://www.larousse.fr/encyclopedie/nom-commun-nom/liberal/65744>). Sedangkan republikan

Memasuki Republik V nama partai berubah, baik partai kiri maupun partai kanan. Pada tahun 1976 UNR berganti nama menjadi *Rassemblement pour la République* (RPR), dengan Jacques Chirac sebagai ketuanya. Pada tahun 2002 RPR berubah nama menjadi *Union pour le Mouvement Populaire* (UMP). Sedangkan SFIO berubah nama menjadi *Parti Socialiste* (PS) pada tahun 1971, dengan François François Mitterrand sebagai ketuanya. Sementara *Parti Communiste* berubah nama menjadi *Parti Communiste Français* (PCF). Partai-partai kiri yang memiliki ideologi komunis dan sosialis selama Republik V banyak berfungsi sebagai oposisi terhadap partai kanan yang berkuasa. PS dan PCF berkembang, sehingga pada awal tahun 1980-an partai kiri berhasil memenangkan pemilihan presiden dengan François François Mitterrand sebagai calon tunggalnya.

Pada tahun 1970-an konstelasi politik di Prancis mulai berubah. Pada tahun-tahun ini muncul partai tengah (*centrist*). Kelompok ini cenderung netral dan terbuka terhadap program-program yang direncanakan dari partai kiri maupun kanan. Adakalanya kelompok tengah ini memihak ke kelompok ke kelompok liberal dan ada kalanya memihak paham komunis sosialis. Dengan demikian kelompok tengah ini memiliki peran yang sangat besar dalam menengahi antara kelompok kanan dan kelompok kiri. Contoh dari partai tengah adalah *Union pour la Démocratie Française* (UDF).

Seiring dengan berjalannya waktu, kelompok kiri maupun kelompok kanan berkembang sesuai dengan ideologi yang tumbuh di masyarakat Prancis. Hal ini ditandai dengan munculnya pengelompokan baru dalam parlemen. Kondisi ini memungkinkan munculnya kelompok ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Kedua kelompok ini muncul setelah terakomodasinya ideologi ultra nasionalis dan ultra komunis. Ultra nasionalis sering disebut sebagai ekstrim kanan dan ultra komunis disebut ekstrim kiri.

---

paham yang memihak kepada bentuk negara republik (<http://www.larousse.fr/encyclopedie/nom-commun-nom/republicain/87682>)

<sup>19</sup>Partai Sosialis merupakan partai dengan ideologi sosialisme, yaitu paham dengan tujuan keadilan bagi seluruh warga negara dalam berbagai bidang, baik itu sosial, ekonomi, maupun pendidikan (<http://www.larousse.fr/encyclopedie/nom-commun-nom/socialisme/92317>). Sedangkan partai Komunis berpaham komunisme, yaitu paham yang menghendaki adanya persamaan dalam hal kepemilikan sesuatu, misalnya barang. Dalam hal ekonomi paham ini menginginkan persamaan derajat bagi semua, dan menolak munculnya kelas sosial tertentu (<http://www.larousse.fr/encyclopedie/nom-commun-nom/communisme/35565>).

Le Front National yang didirikan oleh Jean Marie Le Pen pada tahun 1972, merupakan gabungan dari pendukung paham neo fasis (Addinall, 68).<sup>20</sup> Pada pemilihan presiden tahun 1995 partai ini merupakan satu-satunya partai yang tidak melibatkan perempuan dalam kebijakan-kebijakan yang diambilnya (Hasse-Dubosc, 189). Partai ini lebih memperjuangkan paham tentang keaslian bangsa Prancis dalam kaitannya dengan semakin banyaknya imigran di Prancis.

Di lain pihak ekstrim kiri mulai berdiri setelah pecahnya peristiwa Mei 1968. Partai yang beraliran ekstrim kiri adalah Lutte Ouvrière (LO). Di Prancis partai ini disebut trotskyst, karena diilhami oleh paham yang dibawa oleh Leon Trotsky, seorang politisi Rusia yang berperan penting dalam pecahnya revolusi Bolshevik di Rusia tahun 1917. Tujuan utama kelompok trotskyst tidak hanya sekedar menghapuskan kelas-kelas dalam masyarakat seperti tujuan dari partai Komunis, lebih dari itu kelompok ini menginginkan dominasi kaum buruh dalam penyelenggaraan negara.

Partai kiri memiliki pandangan terhadap perempuan, karena perempuan harus diberdayakan sama seperti laki-laki yang memiliki tujuan untuk mendominasi penyelenggaraan negara. Dengan demikian tidak boleh terjadi diskriminasi terhadap perempuan (Fields, 557). Partai kiri menilai pengelompokan sebagai suatu kelas khusus dalam masyarakat tidak sesuai dengan prinsip yang mereka perjuangkan. Hal inilah yang merupakan salah satu dari faktor yang menyebabkan partai kiri memenangkan pemilu presiden 1981.

---

<sup>20</sup>Neo fasisme adalah paham yang muncul di politik setelah Perang Dunia II. Seperti namanya paham ini merupakan pembaharuan dari paham fasis yang berkembang sebelum dan selama Perang Dunia II. Fasis menekankan pada ultra nasionalis, berlawanan dengan kebebasan individu, cenderung rasis dan xenofobis (fobia terhadap orang asing). Sedikit perbedaan dengan fasisme, neo fasisme menolak masuknya imigran, terutama dari luar Eropa. Neo fasisme beranggapan para imigran inilah yang menyebabkan ekonomi negara tidak stabil, dan menghalangi ruang gerak penduduk 'asli' (bukan imigran ataupun keturunan imigran) untuk memperoleh fasilitas dari negara (<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/408862/neofascism>).

**BAB 3**  
**KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM POLITIK PRANCIS**  
**TAHUN 1945-1981**

Dalam bab ini dijelaskan tentang keterlibatan perempuan dalam politik Prancis dari tahun 1945 hingga berakhirnya masa presiden Valéry Giscard d'Estaing. Pembahasan dalam bab ini terfokus pada partisipasi perempuan dalam politik. Keterlibatan perempuan dalam pemilu Prancis diawali pada masa Gouvernement Provisoire de la République Française (GPRF) yang mengeluarkan ordonansi no.17 tahun 1944. Dalam ordonansi ini pemerintah melegalkan perempuan untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum tingkat *municipal* yang dilaksanakan pada bulan April 1945. Sedangkan pemilu legislatif tingkat nasional dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 1945.

Pemilu legislatif tingkat nasional menghasilkan sistem pemerintahan baru, menggunakan konstitusi yang baru pula. Pemerintahan yang baru ini disebut pemerintahan Republik IV. Untuk pertama kalinya perempuan Prancis memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki, di segala bidang pada masa Republik IV. Hal ini tercantum dalam pembukaan Konstitusi Republik IV tanggal 27 Oktober 1946, alinea ketiga, yang berbunyi "*La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme*". Artinya "Hukum menjamin perempuan, dalam semua bidang, memiliki hak yang sama dengan laki-laki" (<http://www.legifrance.gouv.fr/html/constitution/const02.htm>). Dengan demikian mulai Republik IV hingga kini persamaan hak antara perempuan dan laki-laki dijamin berdasarkan konstitusi. Undang-undang dasar ini melegalkan semua warga negara Prancis, termasuk perempuan, untuk terlibat di bidang politik.

Pembahasan keterlibatan perempuan dalam politik Prancis memiliki kecenderungan khusus, dari tahun 1945 hingga 1981, yang berbeda dengan keterlibatan perempuan dalam politik Prancis mulai tahun 1981 sampai kini. Masa GPRF dan Republik IV masuk dalam satu sub-bab karena inilah masa-masa awal partisipasi perempuan dalam politik. Pada sub bab berikutnya pembagian didasarkan pada periode kekuasaan presiden. Hal ini karena setiap presiden

memiliki kebijakan yang berbeda tentang perempuan dalam politik. Dalam satu periode pemerintahan presiden biasanya memiliki kebijakan khusus tentang perempuan yang berbeda dari presiden lain.

### **3.1 Keterlibatan Perempuan dalam Politik Prancis Masa Republik IV**

Charles Charles de Gaulle sebagai pemimpin GPRF menyadari benar bahwa setiap warga negara, tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan, memiliki hak dan kewajiban yang sama di seluruh wilayah Prancis. Ide tentang persamaan hak ini dituangkan dalam ordonansi no.17. Inti dari ordonansi ini adalah kaum perempuan berhak untuk memberikan suaranya dalam pemilihan umum tingkat *municipal* dan *cantonal*.

Ordonansi tersebut baru dilaksanakan pada tanggal 29 April hingga 13 Mei 1945, ketika masyarakat Prancis melakukan pemilihan umum legislatif tingkat *cantonal* dan *municipal*. Sementara pemilihan umum legislatif tingkat nasional, yang memilih anggota parlemen, dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 1945. Dalam pemilihan umum ini perempuan sudah dilibatkan. Ini merupakan pemilu tingkat nasional pertama bagi kaum perempuan dalam sejarah Prancis.

Keterlibatan perempuan untuk pertama kalinya dalam pemilu Prancis menjadi ajang bagi partai-partai politik untuk menarik simpati pemilih. Mereka mendirikan divisi perempuan. Misalnya, Partai Komunis mempunyai Union des Femmes Françaises (UFF), partai MRP dengan Union Féminine Civique et Sociale (UFCS), atau partai Radikal lewat Femmes Radicales (Duchen, 41-42). Kampanye partai pun mengangkat isu perempuan, seperti kesejahteraan keluarga, kesehatan, dan perhatian bagi para lansia dan janda.

Pada pemilu tanggal 21 Oktober 1945 untuk memilih anggota Assemblée Constituante, sebanyak 25 juta orang terdaftar sebagai pemilih. Sedangkan jumlah suara yang masuk sekitar 20 juta, sekitar 1/5 abstain (Chapsal, 139). Jumlah perempuan yang abstain lebih tinggi dibanding laki-laki.

Pemilu ini dimenangkan oleh partai komunis (26,26%), diikuti partai sosialis (25,14%), dan partai MRP (23,94%) (Chapsal, 140). Sedangkan bagi pemilih perempuan partai MRP meraih suara tertinggi. Sebanyak 58% perempuan memilih MRP (Duchen, 39). Partai MRP dipilih oleh perempuan karena

kampanyenya yang menekankan pada kesejahteraan keluarga, disamping kedekatan partai ini dengan Charles de Gaulle. Perlu diketahui bahwa pilihan perempuan pada saat itu sangat terpengaruh dengan profil Charles de Gaulle yang sangat dominan pada masa itu. Charles de Gaulle merupakan figur yang sangat populer di kalangan masyarakat Prancis karena memimpin gerakan *Résistance*<sup>21</sup>, dan mengesahkan *ordonnance* no.17 tahun 1944.

Selain sebagai pemilih, perempuan Prancis juga menjadi wakil rakyat di parlemen. Diawali dari terpilihnya 33 perempuan sebagai anggota legislatif *Assemblée Constituante*, yang bertugas menyipakan Konstitusi Republik IV. Mereka berasal dari Partai Komunis (17 orang), Partai Sosialis (6 orang), Partai *Mouvement Républicain Populaire* (9 orang) dan Partai *Républicain de la Liberté* (1 orang) ([www.assemblee-nationale.fr/femmes/citoyennete\\_politique\\_chronologie.asp](http://www.assemblee-nationale.fr/femmes/citoyennete_politique_chronologie.asp)). Jumlah ini hanya 5,6% dari 627 anggota *Assemblée Constituante* saat itu.

Setahun kemudian, memasuki masa Republik IV, terpilih kembali 30 perempuan sebagai anggota *Assemblée Nationale* (<http://www.assemblee-nationale.fr/elections/femmes-députées.asp>). Dibanding tahun sebelumnya jumlah perempuan di parlemen lebih sedikit. Namun masa ini muncul perempuan pertama yang memimpin *Assemblée Nationale*. Dialah Madeleine Braun, menjabat sebagai wakil ketua *Assemblée Nationale* yang dilantik pada tahun 1946 ([http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/femmes/citoyennete\\_politique\\_PARITE.asp](http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/femmes/citoyennete_politique_PARITE.asp)).

Madeleine Braun (1907-1980), seorang sarjana hukum yang terlibat dalam gerakan *Résistance*, merupakan kader partai komunis sejak pertama kali terjun ke dunia politik tahun 1940-an. Ia terpilih sebagai salah satu di antara 33 perempuan anggota *Assemblée Constituante* tahun 1945. Ia bertugas untuk menyusun rancangan undang-undang dasar yang berhubungan dengan masalah luar negeri dan imigran (<http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/biographies/IVRepublique/braun-nee-weil-madeleine-25061907.asp>)

Sementara di lembaga legislatif lainnya, *Sénat*, yang waktu itu masih bernama *Le Conseil de La République*, jumlah senator perempuan jauh lebih

<sup>21</sup> *La Résistance* adalah sebuah gerakan persatuan rakyat Prancis pada masa Perang Dunia II untuk mempertahankan Prancis dan melawan penguasa yang menduduki Prancis dimotori oleh Charles Charles de Gaulle (<http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Résistance/138691>)

sedikit dibandingkan di Assemblée Constituante, yaitu hanya tiga orang (<http://www.senat.fr/evenement/archives/D25/pionn.html>). Dari 231 anggota Sénat, hanya ada tiga perempuan, yaitu Marie-Hélène Cardot dari Ardennes, Isabelle Claeys dari Nord, dan Claire Saunier yang dipilih oleh Assemblée Nationale (<http://www.senat.fr/evenement/archives/D25/pionn.html>).

Pada lembaga eksekutif dan legislatif daerah beberapa perempuan ambil bagian sebagai wakil rakyat di tingkat daerah dan juga wakil kota. Data secara kuantitatif menyebutkan, perempuan di lembaga legislatif dan eksekutif Prancis tidak lebih dari 0 hingga 3% dari jumlah wakil rakyat maupun wakil kota.<sup>22</sup> Pada tahun 1947 perempuan yang menjadi wakil kota berjumlah 250 orang, hanya 0,7% dibandingkan jumlah semua wakil kota di Prancis. Sedangkan empat tahun kemudian jumlahnya meningkat menjadi 300 orang (Duchen, 52).

Di tingkat nasional, perempuan pertama dalam kementerian Prancis muncul pada Republik IV. Andrée Vienot memegang jabatan dalam pemerintahan Prancis sebagai *sous-secrétaire d'Etat* bidang pemuda dan olahraga. Sebelum menjabat dalam kabinet Vienot (1901-1976), yang berasal dari Ardenne, pernah menjadi walikota Rocroy pada masa Perang Dunia II (<http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/biographies/IVRepublique/vienot-nee-mayrisch-andree-marie-mathilde-07061901.asp>). Vienot juga aktif dalam dunia jurnalistik dan mendirikan majalah *Reveil Ardennais*. Ia adalah salah satu aktivis semasa Résistance.

Setelah Vienot, Germaine Poinso-Chapuis juga menjabat sebagai menteri kesehatan pada tahun 1947-1948. Poinso-Chapuis (1901-1981) adalah perempuan pertama di Marseille yang berhasil menyelesaikan pendidikan dengan gelar sarjana hukum. Ia juga kader partai MRP dan menjadi salah satu anggota Assemblée Constituante 1945 (<http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/biographies/IVRepublique/poins-chapuis-germaine-06031901.asp>). Poinso-Chapuis merupakan perempuan pertama yang menjabat sebagai menteri di Prancis.

Pada tahun 1949 hingga berakhirnya Republik IV tidak ada perempuan yang duduk dalam pemerintahan. Keadaan ini terjadi karena perempuan pada

---

<sup>22</sup> Pada lembaga legislatif tingkat daerah, berdasarkan data tahun 1947, jumlahnya sekitar 14.889 orang di seluruh Prancis. Jumlah ini hanya sekitar 3,1% dari seluruh wakil rakyat di Prancis (Duchen, 52)

waktu itu masih banyak yang beranggapan bahwa berpolitik melawan kodrat perempuan, yaitu mengurus keluarga. Di samping itu pemerintah saat itu juga beranggapan perempuan tidak bisa menangani bidang politik di luar masalah pendidikan dan kesehatan. Dua bidang ini adalah bidang-bidang yang paling dekat dengan kehidupan perempuan (Duchen, 53-56).

Keterlibatan perempuan dalam politik masa itu juga banyak terpengaruh oleh latar belakang keluarga. Beberapa perempuan yang berkiprah di politik terpengaruh karier suami yang lebih dulu terjun ke politik. Marcelle Davaud, anggota Sénat dari Seine, adalah istri dari Stanislas Devaud yang sebelumnya pernah menjadi wakil rakyat dari wilayah Constantine (1936-1942), Marie-Claude Vaillant-Couturier, anggota Assemblée Nationale dari Val-de-Marne (menjabat mulai tahun 1948) adalah janda dari Paul Vaillant-Couturier yang sebelumnya pernah menjadi anggota Assemblée Constituante dari wilayah Seine (1919-1937), atau Mathilde Péri, anggota Assemblée Nationale dari wilayah Seine et Oise, adalah janda dari Gabriel Péri, mantan anggota Chambre des Députés tahun 1932-1940 (Hubac, 97-98).

Di luar lembaga eksekutif dan legislatif partisipasi perempuan di politik terlihat di organisasi-organisasi perempuan. Union Féminine Civique et Sociale (UFCS) dan Union des Femmes Françaises (UFF) adalah dua organisasi perempuan yang memiliki nama besar pada Republik IV (Duchen, 166). UFCS adalah organisasi yang telah berdiri sejak tahun 1925.<sup>23</sup> Organisasi ini merupakan divisi perempuan dari partai MRP, yang mengedepankan kampanye tentang keluarga.<sup>24</sup>

Sedangkan UFF adalah organisasi perempuan yang didukung oleh partai Komunis (PC). Berbeda dengan UFCS, UFF mendorong perempuan untuk keluar dari dunia yang selama ini sekemudian identik dengan perempuan, yaitu rumah

---

<sup>23</sup>UFCS didirikan oleh Andrée Butillard (1881-1955). Merupakan organisasi perempuan yang berlatar belakang agama Katolik. Sejak awal berdiri berkampanye tentang pentingnya keluarga, pendidikan bagi perempuan, serta kampanye moral yang berhubungan dengan agama, misalnya melarang alkohol dan prostitusi (Duchen, 41-42; [http://bu.univ-angers.fr/index.php?S\\_file=archives/fiche.php&ref\\_archive=31](http://bu.univ-angers.fr/index.php?S_file=archives/fiche.php&ref_archive=31))

<sup>24</sup>MRP adalah partai kanan yang didirikan oleh Francisque Gay tahun 1920. Partai ini berlatar belakang Katolik dan merupakan partai pendukung Charles Charles de Gaulle. MRP merupakan salah satu di antara tiga partai besar pada Republik IV, selain SFIO dan Partai Komunis (PC) (Chapsal, 249-250 dan <http://www.universalis.fr/encyclopedie/mouvement-republicain-populaire/>)

tangga. Kampanye UFF menekankan pada perempuan bekerja, perempuan yang sejajar dengan laki-laki, dan bukannya menjadi sub-ordinatnya (Duchen, 43-44).

Sebelum Perang Dunia organisasi-organisasi perempuan menuntut legalisasi perempuan memberikan suaranya di pemilu. Pada masa Republik IV tuntutan organisasi seperti ini lebih banyak menyangkut hak-hak perempuan, seperti pendidikan atau pembayaran upah kerja yang tidak lebih rendah dari laki-laki. Masa ini organisasi perempuan menolak untuk disebut feminis.<sup>25</sup> Para aktivis lebih suka menyebut organisasi perempuan sebagai *féminin*. Ini karena anggapan masa itu bahwa feminis adalah perempuan yang sekemudian berusaha untuk seperti laki-laki (Duchen, 173).

### **3.2 Keterlibatan Perempuan dalam Politik Prancis Republik V: Masa Presiden Charles Charles de Gaulle, Georges Pompidou, dan Valéry Giscard d'Estaing**

Pada sub-bab ini dijelaskan tentang partisipasi perempuan masa Republik V, sejak masa Charles Charles de Gaulle hingga Valéry Giscard d'Estaing. Hal ini karena kebijakan yang dikeluarkan pada masa ini kurang mengakomodasi keterlibatan perempuan dalam dunia politik. Keadaan ini terlihat dari kurangnya akses perempuan dalam dunia politik.

Sejak pemerintahan Charles de Gaulle hingga Valéry Giscard d'Estaing kebijakan pemerintah terhadap perempuan lebih terfokus pada keluarga Prancis. Hal ini karena pemerintah Prancis saat itu menekankan pada kebijakan demografi. Prancis saat itu mengalami *dénatalité*<sup>26</sup> dan serbuan kedatangan imigran ke Prancis. Untuk meningkatkan kelahiran, kepala negara menekankan pada kebahagiaan keluarga dengan mengeluarkan beberapa kebijakan, antara lain kebijakan tentang persatuan keluarga (*rassemblement de la famille*). Dengan kebahagiaan keluarga, diharapkan kualitas bangsa Prancis menjadi lebih baik.

<sup>25</sup>Feminisme adalah suatu paham yang menghendaki kesetaraan derajat antara perempuan dan laki-laki. Perempuan tidak lagi dianggap sebagai 'kelas dua' dalam masyarakat, sehingga tidak dapat menikmati berbagai fasilitas, seperti pendidikan tinggi atau upah yang sama dengan laki-laki. Paham ini muncul di negara-negara Eropa sejak akhir abad ke-18 (<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/724633/feminism>)

<sup>26</sup>*Dénatalité* adalah angka kelahiran yang rendah

### 3.2.1 Masa Presiden Charles Charles de Gaulle (1958-1969)

Republik V dibentuk berdasarkan konstitusi tanggal 4 Oktober 1958 yang menjadi konstitusi Prancis saat ini. Tanggal 21 Desember 1958 Charles Charles de Gaulle terpilih sebagai presiden Prancis dengan 78,5% suara dari parlemen (Winnock, 16). Tahun 1958 sebelum Charles de Gaulle menjadi presiden, partainya, UNR, memenangkan pemilu legislatif yang diadakan pada tanggal 23 November 1958. Perempuan merupakan mayoritas pemilih UNR. Persentasenya meyeentuh angka 55% dari keseluruhan pemilih (Duchen, 60).

Sebulan setelah penunjukkan Charles de Gaulle sebagai presiden, Michel Debré, yang waktu itu menjabat sebagai perdana menteri, menunjuk Nefisa Sid Cara sebagai *secrétaire d'Etat* menangani Aljazair serta warga negara Muslim di Aljazair dan Prancis ([http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/femmes/citoyennete\\_politique\\_PARITE.asp](http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/femmes/citoyennete_politique_PARITE.asp)). Sebelumnya Sid Cara, yang memang lahir di Aljazair, pernah menjabat sebagai anggota Assemblée Nationale selama satu tahun (1958-1959).

Sid Cara adalah seorang dosen sastra yang menaruh perhatian besar terhadap Aljazair dan perempuan. Selama bertugas di parlemen ia aktif memperjuangkan nasib orang Aljazair, khususnya imigran perempuan Aljazair yang bekerja di Prancis. Selain berpolitik di parlemen, Sid Cara juga menjadi wakil ketua Comité Central d'Action Sociale et de Solidarité Féminine. Di samping Sid Cara, nama perempuan di politik yang menonjol saat itu adalah Marie-Madeleine Dienesch dan Jacqueline Thome-Patenôtre yang pernah menjabat sebagai wakil ketua Assemblée Nationale<sup>27</sup> ([http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/femmes/citoyennete\\_politique\\_PARITE.asp](http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/femmes/citoyennete_politique_PARITE.asp)).

Pada saat presiden Charles Charles de Gaulle jumlah perempuan yang terlibat aktif di bidang politik lebih sedikit dibandingkan dengan dua belas tahun masa Republik IV. Di Assemblée Nationale hanya sekitar 2,31% pada tahun 1958 (Duchen, 61). Sementara itu di Sénat jumlahnya kurang dari 2% sepanjang tahun

<sup>27</sup> Marie Madeleine Dienesch adalah wakil rakyat dari Côtes-du-Nord yang menjabat sebagai wakil ketua Assemblée Nationale tahun 1958. Ia juga pernah menjabat sebagai *secrétaire d'état* bidang pendidikan masa pemerintahan perdana menteri Georges Pompidou (1968). Sedangkan Jacqueline Thome-Patenôtre menjabat sebagai wakil ketua Assemblée Nationale selama enam kali: 1960, 1962, terpilih kembali tahun 1962, 1963, 1965, dan 1967 (<http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/femmes/vice-presidentes.asp>).

1960-an (Duchen, 62). Jumlah perempuan yang abstain dalam pemilu juga tergolong tinggi, menyentuh seperempat dari jumlah pemilih perempuan. Tercatat pada pemilu legislatif tahun 1962, 25% perempuan abstain (Mossuz Lavau, (1993) 674).

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, prinsip pemerintahan Charles de Gaulle menggagas program *rassemblement de la famille*. Untuk merealisasikan gagasannya, presiden Charles de Gaulle juga tidak terlalu mendukung perempuan dalam pemerintahan. Salah satu pernyataannya dimuat di harian *L'Express* tahun 1963. Charles de Gaulle mengatakan bahwa perempuan lebih baik jika berada di rumah, mengurus anak, dan rumah tangga. Tujuan dari himbauan ini adalah untuk meningkatkan kualitas keluarga Prancis. Namun, himbauan itu ditafsirkan lain dalam harian itu, dengan sindiran yang mengatakan bahwa apabila perempuan muda dan cantik dilibatkan dalam pemerintahan, maka mereka akan mengganggu anggota sidang yang lain maupun jalannya sidang (Duchen, 61).

Pemerintahan yang dikuasai oleh simpatisan Charles de Gaulle mengakibatkan sedikitnya perempuan yang terlibat di dunia politik. Hal ini merupakan konsekuensi dari prinsip yang dicanangkan Charles de Gaulle. Kebanyakan aktivis perempuan yang ingin terjun di bidang politik bergabung dengan partai-partai kiri, seperti partai Komunis dan partai SFIO. Ironisnya, jumlah perempuan yang memilih partai kiri pada pemilu legislatif lebih rendah dari laki-laki. Dari data pemilu tahun 1958 hanya 32% pemilih perempuan memilih partai kiri, dibandingkan dengan pemilih laki-laki yang 44% (Mossuz Lavau (1993), 676). Sedangkan tahun 1962 jumlahnya menurun, hanya 26% (Mossuz Lavau (1993), 676). Pada pemilu presiden tahun 1965, hanya 39% perempuan yang memilih François Mitterrand, berbanding 51% pemilih laki-laki yang memberikan suara untuk François Mitterrand (Mossuz Lavau (1993), 676).<sup>28</sup> Padahal François Mitterrand memakai isu perempuan, yaitu legalisasi kontrasepsi<sup>29</sup> sebagai janji kampanye presiden.

---

<sup>28</sup>Pada pemilu presiden 1965 Charles Charles de Gaulle bersaing dengan François François Mitterrand. Pemilu dimenangkan Charles de Gaulle dengan perolehan suara 54,5% berbanding 45,5% (Winnock, 40)

<sup>29</sup>Kontrasepsi dilegalkan di Prancis pada tahun 1967 berdasarkan La Loi Neuwirth (Loi no.67-1176 tanggal 28 Desember 1967) tentang kesehatan masyarakat (<http://www.france.fr/en/living/health/health-system/service/access-contraception>)

Pada tingkat organisasi perempuan, kebanyakan organisasi itu hanya mengangkat isu perempuan, seperti perjuangan melegalkan aborsi dan penggunaan kontrasepsi secara bebas, yang saat itu berseberangan dengan politik pemerintah yang menghendaki lahirnya banyak anak dalam keluarga Prancis. Beberapa organisasi yang terkenal saat itu adalah Jeunes Femmes<sup>30</sup>, Association Maternité Heureuse<sup>31</sup>, Mouvement Français pour le Planning Familial, dan Mouvement Démocratique Féminin (Duchen, 170). Di antara keempat organisasi ini hanya Mouvement Démocratique Féminin (MDF) yang mengangkat isu perempuan dalam politik, disamping isu perempuan seperti pendidikan dan kesetaraan gaji. MDF didukung oleh partai SFIO dan menjadi organisasi pertama yang menuntut adanya menteri pemberdayaan perempuan di kabinet (Duchen, 172).

### **3.2.2 Masa Presiden Georges Pompidou (1969-1974)**

Georges Pompidou terpilih sebagai presiden setelah menang dalam pemilu yang diadakan pada tanggal 1 Juni 1969. Ia mengalahkan kandidat kuat lainnya, Alain Poher, mantan ketua Sénat. Pompidou adalah seorang loyalis Charles de Gaulle dan anggota partai Union pour la Défence de la République (UDR), partai pendukung Charles de Gaulle.<sup>32</sup>

Selama kepemimpinannya, Prancis mengalami beberapa kemajuan. Antara lain dalam bidang ekonomi, dengan peningkatan produksi bidang pertanian, dan bidang sosial, yaitu penurunan angka kematian bayi. Prancis menjadi salah satu negara dengan angka kematian bayi terendah di dunia (Goubert, 312).

Kemajuan ini tidak diikuti dengan kemajuan perempuan dalam bidang politik. Meskipun pada saat itu untuk pertama kalinya Prancis memiliki duta besar perempuan, hal ini tidak terjadi di parlemen dan pemerintahan. Jumlah anggota

---

<sup>30</sup> Jeunes Femmes adalah organisasi perempuan berlatar agama Kristen Protestan yang didirikan di Paris tahun 1946. Organisasi ini mendorong emansipasi perempuan dengan menerbitkan bacaan dan jurnal tentang perempuan (Duchen, 171)

<sup>31</sup> Association Maternité Heureuse adalah organisasi perempuan yang fokus pada kesehatan perempuan (Duchen, 173)

<sup>32</sup> Union pour la Défence de la République (UDR) adalah nama partai yang mulai dipakai sejak tahun 1968. Sebelumnya partai ini bernama Union pour la Nouvelle République (UNR) partai yang didirikan Charles Charles de Gaulle tahun 1958.

perempuan di parlemen sangat minim.<sup>33</sup> Semasa presiden Pompidou jumlah perempuan dalam parlemen mencapai titik terendah, yaitu hanya sekitar 1% dari semua anggota *Assemblée Nationale* pada tahun 1973 ([www.journaldesfemmes.com/carriere/0706-femmesassemblee/107femmes.shtml](http://www.journaldesfemmes.com/carriere/0706-femmesassemblee/107femmes.shtml))

Tokoh perempuan yang terkenal pada saat itu adalah Marie-Madeleine Dienesch. Ia termasuk pelopor politikus perempuan Prancis. Dienesch telah berkiprah sejak masa kepresidenan Charles de Gaulle sebagai satu-satunya perempuan dalam kabinet dan menjabat sebagai *secrétaire d'état* bidang pendidikan nasional. Pada era kepresidenan Georges Pompidou (1969-1974) Dienesch beberapa kali ditunjuk sebagai *secrétaire d'état*. Ia pernah menjadi *secrétaire d'état* menangani bidang kesehatan masalah *sécurité sociale*, dan pernah pula menjadi *secrétaire d'état* bidang kesehatan masalah aksi sosial.<sup>34</sup> Dienesch bahkan pernah menjadi anggota *Assemblée Constituante*, yang merancang naskah konstitusi bidang pendidikan nasional. Setelah ditetapkannya undang-undang dasar tahun 1946, Dienesch dipercaya untuk menjabat sebagai salah satu wakil ketua *Assemblée Nationale*, dan menjadi perempuan pertama sebagai komisi parlemen yang menangani bidang keluarga. Selama terlibat dalam pemerintahan Prancis Dienesch telah mengajukan dua puluh empat undang-undang dan resolusi serta beberapa amandemen ([www.senat.fr/evenement/archives/D35/dienesch.html](http://www.senat.fr/evenement/archives/D35/dienesch.html)).

Jumlah perempuan yang menjadi anggota parlemen sangat sedikit. Namun banyak di antara mereka yang bergabung organisasi perempuan. Meskipun peristiwa Mei 1968<sup>35</sup> tidak memberi dampak terhadap perempuan dalam politik pada masa presiden Charles de Gaulle, tapi setelah peristiwa itu perempuan mulai

<sup>33</sup> Marcelle Campana adalah perempuan Prancis pertama yang menjabat sebagai duta besar. Pada tahun 1972 ia diangkat sebagai duta besar perempuan pertama yang ditempatkan di Panama (Danéchère, 90)

<sup>34</sup> Marie-Madeline Dienesch selama masa presiden Georges Pompidou (1969-1974) menjadi *secrétaire d'état* pada semua era perdana menteri. Tiga kali sebagai *secrétaire d'état* bidang kesehatan masalah *sécurité sociale* di era PM Jacques Chaban-Delmas (1969-1972), era pemerintahan kedua PM Pierre Messmer (1973-1974), dan pemerintahan ketiga PM Pierre Messmer (1974). Menjabat sebagai *secrétaire d'état* bidang kesehatan menangani aksi sosial pada masa kabinet pertama PM Pierre Messmer (1972-1973) (<http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/gvt5rep.asp>)

<sup>35</sup> Mei 68 merupakan revolusi sosial, budaya, dan sosial yang menentang kapitalisme, menghendaki kebebasan. Pertama kali muncul di Universitas Nanterre kemudian berkembang ke Paris. Diikuti oleh para pelajar dan pekerja (Duchen, 192)

ambil bagian dalam pergerakan menuntut kesetaraan gender (Duchen, 191). Media-media perempuan, seperti *Elle* dan *Marie Claire*, mendorong perempuan untuk memperjuangkan hak-haknya. Mulai masa ini aktivis perempuan serta organisasi-organisasi perempuan mulai menggunakan istilah “feminis” untuk menyebut aktivis perempuan (Duchen, 191).

Berbeda dengan masa Republik IV, setelah peristiwa Mei 68 kata “feminis” tidak lagi berarti perempuan yang ingin terlihat seperti laki-laki dan kehilangan sisi femininnya. Feminis adalah perempuan yang menuntut sederajat dengan laki-laki, tapi tidak kehilangan sisi femininnya (Duchen, 191). Bagi para feminis pada masa itu figur perempuan yang sukses di luar urusan rumah tangga menjadi sosok ideal.

Beberapa organisasi feminis yang muncul pada masa itu antara lain *Mouvement de Libération des Femmes (MLF)*, dan *Choisir*. MLF adalah organisasi perempuan dengan tokohnya yang terkenal, Anne Zalensky (Duchen, 208). Organisasi ini memperjuangkan legalisasi aborsi dan menentang diskriminasi terhadap perempuan di kehidupan sosial dan politik. Sedangkan *Choisir*, dengan tokohnya Gisèle Halimi, dibentuk tahun 1971. Hampir sama dengan MLF, *Choisir* juga mendukung legalisasi aborsi (Hurtig, Mossuz Lavau, dan Sineau, 2509).

Pada tahun 1971 di Paris terjadi demonstrasi besar-besaran yang disebut “*Le Manifeste de 343*”. Dalam demonstrasi ini 343 perempuan yang merupakan tokoh-tokoh berpengaruh di masyarakat (penulis, artis, sinseas, dan jurnalis) menuntut dilegalkannya aborsi (Hurtig, Mossuz Lavau, dan Sineau, 2511). Dua tahun kemudian berdiri organisasi perempuan, *Psychanaliste et Politique* atau biasa disebut *Psych et Po*.<sup>36</sup> Organisasi ini memperjuangkan kesetaraan gender lewat penerbitan buku dan majalah untuk perempuan.

Keterlibatan perempuan dalam politik masa presiden Georges Pompidou juga ditandai dengan lahirnya feminis revolusioner, yang bergabung dengan partai-partai ekstrim kiri.<sup>37</sup> Feminis revolusioner menginginkan suatu organisasi

---

<sup>36</sup>*Psych et Po* adalah organisasi feminis yang memperjuangkan kesetaraan gender, khususnya dalam politik. Organisasi ini didirikan oleh Antoinette Fouque tahun 1972. (Jenson, 57)

<sup>37</sup>Setelah Mei 1968 partai-partai ekstrim kiri lahir dengan ideologi trotskyisme. Partai-partai tersebut antara lain *Ligue Communiste Révolutionnaire*, *Voix Ouvrière*, dan *Gauches Proletarienne* (Hurtig, Mossuz Lavau, dan Sineau, 2509)

yang egal dan tidak hierarkis. Mereka menganggap negara tidak dapat melakukan perubahan bagi perempuan karena adanya hierarki dalam penyelenggaraan negara (Jenson 59).<sup>38</sup>

Maraknya organisasi perempuan masa presiden Georges Pompidou terjadi karena perubahan pola pikir perempuan masa itu. Ada beberapa faktor yang memengaruhi berubahnya pandangan perempuan. Perempuan tergerak untuk berani keluar dari apa yang disebut 'kodrat'-nya karena pengaruh revolusi seksual<sup>39</sup> yang terjadi di negara-negara Barat. Selain itu, faktor lain datang dari Jean Luc Godard, yang melalui film-filmnya mendorong kebebasan perempuan.<sup>40</sup> Peristiwa Mei 1968 memberi pengaruh dalam hal kontrol ketat atas perilaku perempuan (Hurtig, Mossuz-Lavau, dan Sineau, 2508).<sup>41</sup>

Georges Pompidou memimpin Prancis selama lima tahun (1969-1974). Di tengah mandat sebagai presiden, ia wafat pada tanggal 2 April 1974. Ia kemudian digantikan oleh Valéry Giscard d'Estaing.

<sup>38</sup>Perubahan dalam hal ini adalah perempuan yang mendapat hak yang sama dengan laki-laki. Laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama, tidak dipisah-pisahkan. Feminis revolusioner menganggap hierarki di negara menciptakan kelas-kelas sosial. Misalnya kelas buruh, kelas pemilik modal, atau kelas penguasa negara (presiden, menteri, dsb). Dalam pandangan feminis revolusioner kelas seperti ini akan mengakibatkan perempuan terpojok, karena perempuan pun akan dianggap sebagai sebuah kelas sosial. Tidak akan terwujud keadaan yang benar-benar seimbang bagi perempuan dan laki-laki (Jenson, 59)

<sup>39</sup>Revolusi seksual adalah perubahan pola pikir masyarakat tentang seks yang berlangsung di negara-negara di Eropa dan Amerika pada tahun 1960-an (<http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/sexual-revolution>). Seks tidak lagi dipandang sebagai hal yang tabu.

<sup>40</sup>Jean Luc Godard (lahir 1930) adalah sutradara dan produser film Prancis. Godard terkenal dengan film-filmnya yang memberikan pandangan baru mengenai hubungan antara laki-laki dan perempuan. Bahwa perempuan dapat memperoleh kebebasan dan tidak terkekang oleh laki-laki. Misalnya dalam salah satu filmnya, *Vivre sa Vie*, yang bercerita tentang seorang wanita yang meninggalkan suaminya demi mengejar impiannya sebagai aktris (<http://movies.nytimes.com/person/91804/Jean-Luc-Godard/biography>; <http://movies.nytimes.com/movie/34073/My-Life-To-Live/overview>)

<sup>41</sup>Kontrol atas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan perempuan. Misalnya perempuan tidak diperbolehkan menerima tamu laki-laki di kamar asrama perempuan (Hurtig, Mossuz-Lavau, Sineau, 2508)

### 3.2.3 Masa Presiden Valéry Giscard d'Estaing (1974-1981)

Wafatnya presiden Georges Pompidou membuat pemerintah segera melakukan pemilu presiden untuk menghindari kekosongan kekuasaan. Dalam pemilu putaran pertama yang diadakan 5 Mei 1974, untuk pertama kalinya perempuan mencalonkan diri sebagai kandidat. Arlette Laguiller, tokoh partai ektstrim kiri, Lutte Ouvrière, adalah satu-satunya perempuan dalam deretan calon presiden 1974 (<http://www.france-politique.fr/election-presidentielle-1974.htm>). Laguiller hanya sampai pada putaran pertama karena hanya meraih 2,33% suara (Winnock, 70).

Pemilu ini dimenangkan oleh Valéry Giscard d'Estaing pada putaran kedua dengan 50,81% suara, menggungguli calon lainnya, François Mitterrand (Winnock, 72). Berdasarkan statistik, perempuan lebih banyak memberikan suaranya untuk Valéry Giscard d'Estaing daripada François Mitterrand. Sebanyak 53% perempuan memilih Valéry Giscard d'Estaing sedangkan François Mitterrand hanya mendapat 47% suara (Rudelle, 64).

Selama tujuh tahun berkuasa, Valéry Giscard d'Estaing telah merubah aturan tentang batas usia minimal pemilih dalam pemilu. Pada awalnya 21 tahun menjadi 18 tahun (Rudelle, 64). Selain itu, Valéry Giscard d'Estaing adalah presiden Prancis yang menunjuk sembilan perempuan dalam kabinetnya ([http://www.assembleenationale.fr/histoire/femmes/citoyennete\\_politique\\_PARITE.asp](http://www.assembleenationale.fr/histoire/femmes/citoyennete_politique_PARITE.asp)). Untuk pertama kalinya Prancis memiliki perwakilan dalam kementerian yang mengurus masalah perempuan (*secrétaire d'état à la condition féminine*).<sup>42</sup>

Beberapa tokoh perempuan yang menonjol<sup>43</sup> pada masa presiden Valéry Giscard d'Estaing antara lain:

- a. Simone Veil (lahir tahun 1927)

Simone Veil adalah menteri kesehatan pada masa perdana menteri Jacques Chirac (1974-1976) dan Raymond Barre (1976-1977). Ia kemudian terpilih lagi sebagai menteri sosial. Selama menjadi menteri kesehatan Simone Veil dikenal

<sup>42</sup>Pada masa presiden Valéry Giscard d'Estaing Françoise Giroud diangkat sebagai *secrétaire d'état* bidang pemberdayaan perempuan pada tahun 1974 ([http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/gvt5rep.asp#pmJacques Chirac/vge](http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/gvt5rep.asp#pmJacques%20Chirac/vge))

<sup>43</sup>Yang dimaksudkan sebagai tokoh perempuan yang menonjol adalah perempuan yang menduduki posisi penting dalam pemerintahan, seperti anggota kabinet, atau *secrétaire d'état*.

dengan La Loi Veil (1975),<sup>44</sup> yaitu undang-undang kesehatan. Termasuk di dalam undang-undang ini adalah aturan tentang rumah sakit dan pelayanannya, dan juga cuti dibayar bagi wanita hamil. Selain aktif di Prancis, Simone Veil juga aktif di Uni Eropa. Ia adalah anggota parlemen Uni Eropa. Terakhir ia diangkat menjadi anggota Académie Française tahun 2008 (<http://www.elle.fr/elle/Personnalites/Simone-Veil>).

b. Françoise Giroud (1916-2003)

Françoise Giroud adalah aktivis perempuan sekaligus politikus. Ia adalah mantan wartawan majalah *Elle* dan salah satu pendiri harian *L'Express* (<http://www.evene.fr/celebre/biographie/francoise-giroud-437.php>). Françoise Giroud dikenal sebagai tokoh yang vokal menyerukan perhatian terhadap hak-hak perempuan. Ia menjabat sebagai *secrétaire d'état* bidang pemberdayaan perempuan pada masa perdana menteri Jacques Chirac (1974-1976). Kemudian Françoise Giroud diangkat lagi menjadi *secrétaire d'état* bidang kebudayaan (1976-1977). Selama masa jabatan di pemerintahan, Françoise Giroud membuat "Projet pour les Femmes"<sup>45</sup> tahun 1976 yang isinya usulan tentang hak-hak perempuan.

Selain aktif dalam pemberdayaan perempuan, Françoise Giroud juga aktif di bidang seni, khususnya film. Ia juga aktif di dunia jurnalistik. Françoise Giroud adalah kolumnis untuk harian *Le Figaro* dan *Nouvel Observateur*. Selain itu ia juga seorang penulis novel. Salah satu novelnya tentang perempuan, berjudul *Une Femme Honorable* yang terbit tahun 1981.

c. Alice Saunier-Seïté

Alice Saunier-Seïté adalah tokoh pendidikan dan politik Prancis. Ia menjabat sebagai *secrétaire d'état* mengurus bidang pendidikan tinggi (1976-1978), kemudian menjadi menteri universitas tahun 1979. Alice Saunier-Seïté

<sup>44</sup>La loi no. 75-17 tertanggal 17 Januari 1975 atau dikenal dengan sebutan Loi Veil (karena diusulkan oleh Simone Veil) terdiri dari 16 *article* dan tiga *titre*. Secara umum undang-undang ini mengatur tentang keringanan yang diberikan kepada wanita hamil. Di antaranya wanita hamil dapat mengajukan cuti kepada perusahaan tempatnya bekerja pada akhir minggu kesepuluh dari kehamilannya (<http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/interruption/sommaire.asp>)

<sup>45</sup>Projet pour Les Femmes berisi seratus tuntutan yang diajukan ke pemerintah, intinya menuntut dihapuskannya diskriminasi pada perempuan, termasuk di dalam politik (<http://www.senat.fr/evenement/archives/D35/secretariat1.html>)

merupakan perempuan pertama yang menjabat sebagai rektor di Prancis ([http://www.crdp-reims.fr/ressources/dossiers/bicentenaire\\_rectorat/panneau17.htm](http://www.crdp-reims.fr/ressources/dossiers/bicentenaire_rectorat/panneau17.htm)). Ia pernah menjabat sebagai rektor Académie de Reims tahun 1973-1975.

Di samping munculnya tokoh-tokoh perempuan seperti Simone Veil dan Françoise Giroud, masa presiden Valéry Giscard d'Estaing juga menunjukkan peningkatan dalam hal jumlah perwakilan perempuan di parlemen. Jika di era Georges Pompidou perempuan di Assemblée Nationale jumlahnya hanya sekitar 1%, maka pada masa Valéry Giscard d'Estaing jumlahnya meningkat menjadi 3-4% ([www.journaldesfemmes.com/carriere/0706-femmes-assemblee/107femmes.shtml](http://www.journaldesfemmes.com/carriere/0706-femmes-assemblee/107femmes.shtml)). Sebagai pemilih, jumlah perempuan yang abstain lebih sedikit dibandingkan periode presiden Charles de Gaulle dan Georges Pompidou. Tercatat hanya 10% perempuan yang abstain pada pemilu legislatif tahun 1978 (Mossuz Lavau (1993), 674).

Awal tahun 1970-an partai-partai kiri secara perlahan mulai menggeliat dalam politik Prancis. Tahun 1973 partai-partai kiri (partai Sosialis, partai Komunis, dan partai Radikal) bersatu, mendukung François Mitterrand sebagai calon presiden pada pemilu 1974 (Winnock, 58). Meskipun kalah dari Valéry Giscard d'Estaing, kekuatan kesatuan partai-partai kiri (dikenal dengan *union des gauches*) berhasil merebut suara pada pemilu legislatif 1978 (<http://www.france-politique.fr/elections-legislatives-1978.htm>).

Bersatunya partai kiri mendapat dukungan dari perempuan. Hal ini karena tokoh-tokoh feminis sebagian besar merupakan simpatisan partai-partai kiri. Françoise Giroud dikenal sebagai kader partai Sosialis. Antoinette Fouque, tokoh gerakan feminis Psych et Po, adalah pendukung François Mitterrand. Sedangkan MLF secara terbuka memberikan dukungannya kepada François Mitterrand di pemilu presiden.

Pada akhir masa pemerintahan Valéry Giscard d'Estaing terjadi krisis minyak untuk kedua kalinya setelah tahun 1973.<sup>46</sup> Tahun 1979 dunia kembali mengalami krisis energi. Masalah ini memicu krisis di Prancis, terutama dalam

---

<sup>46</sup>Krisis minyak (*le choc pétrolier*) terjadi dua kali. Pertama tahun 1973 yang disebabkan oleh perang antara Siria, Mesir, dan Israel yang berlangsung hingga 18 maret 1974. Sedangkan krisis minyak kedua terjadi karena revolusi Iran dan perang antara Iran dan Irak tahun 1979 (<http://www.senat.fr/rap/r05-105/r05-1051.html>)

bidang ekonomi. Angka pengangguran meningkat dari 400.000 menjadi 1.500.000 orang pada tahun 1981 (Winnock, 75). Jumlah pengangguran perempuan juga menyentuh angka 5%. Hutang luar negeri mencapai 23 miliar francs.

Akibat tingginya angka pengangguran banyak keluarga Prancis menjadi korban. Program yang dicanangkan oleh pemerintah tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat Prancis. Kekacauan ekonomi ini menyebabkan kepopuleran Valéry Giscard d'Estaing, jatuh (Winnock, 87).

Berdasarkan pemaparan pada bab ini keterlibatan perempuan Prancis di bidang politik telah dimulai pada masa GPRF dan Republik IV. Walaupun hasil dari ordonansi dan alinea pembukaan konstitusi Prancis Republik IV sudah jelas memberikan kesempatan kepada perempuan dalam politik, namun belum banyak perempuan yang terlibat dalam kegiatan politik di Prancis. Selanjutnya masa pemerintahan Charles de Gaulle hingga Valéry Giscard d'Estaing menekankan pada peranan perempuan pada keluarga, sehingga pemerintah lebih memprioritaskan pada pembinaan keluarga Prancis.

Hal ini penting mengingat bahwa penduduk Prancis dalam keadaan kritis akibat *denatalité* dan masuknya imigran ke wilayah Prancis. Apabila hal ini tidak ditanggulangi oleh pemerintah, maka Prancis akan mengalami defisit penduduk yang berakibat pada mahalnnya tenaga kerja di Prancis. Oleh karena itu pemerintah saat itu dari Charles de Gaulle hingga Valéry Giscard d'Estaing memfokuskan peningkatan peranan perempuan di rumah tangga dibandingkan bidang yang lain. Dengan demikian dapat dipahami bahwa keterlibatan perempuan di politik belum berjalan sesuai yang diharapkan.

Sementara itu bagi perempuan yang memiliki potensi untuk terlibat dalam bidang politik, kecenderungan mereka memilih berpartisipasi di organisasi perempuan yang memerjuangkan hak-hak perempuan Prancis, seperti legalisasi aborsi dan penggunaan kontrasepsi yang bertentangan dengan prinsip pemerintah saat itu. Walaupun mereka bergerak di bidang organisasi perempuan, mereka tetap memperjuangkan hak-hak perempuan dalam bidang politik. Namun dengan prinsip yang dianut pemerintah saat itu mereka belum mendapatkan akses yang terbuka untuk aktif di bidang politik.

Sehubungan dengan ideologi yang dianut oleh para pemimpin negara pada saat itu, yang semuanya dari partai kanan, terdapat kecenderungan perempuan menyalurkan aspirasinya ke partai kiri yang merupakan partai oposisi pemerintah. Hal inilah yang kemudian sangat memengaruhi hasil pemilihan umum setelah Valéry Giscard d'Estaing mengakhiri jabatannya. Partai oposisi membuka peluang yang luas bagi kaum perempuan karena mereka memiliki satu tujuan bersama, yaitu kesetaraan gender.



**BAB 4**  
**KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM POLITIK PRANCIS**  
**TAHUN 1981-2007**

Dalam bab ini dijelaskan mengenai keterlibatan perempuan di politik pada masa presiden François François Mitterrand dan Jacques Chirac. François Mitterrand berkuasa di Prancis selama dua periode masa jabatan presiden, yaitu 1981-1988 dan 1988-1995. Ia adalah presiden Prancis pertama di Republik V yang berasal dari partai kiri.

François Mitterrand dikenal sebagai politikus yang gencar memperjuangkan hak perempuan (Duchen, 62). Ia juga mendapat dukungan partai-partai kiri yang mendukung emansipasi perempuan. Kebijakannya berbeda dengan presiden-presiden terdahulu yang berasal dari partai kanan, yang cenderung liberal.

Sedangkan Jacques Chirac berkuasa dari tahun 1995-2002 dan terpilih kembali sebagai presiden pada tahun 2002-2007. Ia berasal dari partai kanan *Rassemblement Pour la République* (RPR). Tidak seperti François Mitterrand yang aktif memperjuangkan hak perempuan, Jacques Chirac hanya meneruskan dan mengembangkan kebijakan yang telah dilakukan François Mitterrand.

Seperti telah diuraikan dalam bab 1, khususnya sub-bab ruang lingkup, penelitian ini dibatasi sampai tahun 2007, yaitu masa berakhirnya kekuasaan presiden Jacques Chirac. Pada pemilu presiden tahun 2007 muncul, untuk pertama kali, kandidat presiden perempuan yang berhasil maju hingga putaran kedua pemilu presiden Prancis. Selain itu tahun 2007 juga merupakan akhir periode kedua jabatan Jacques Chirac sebagai presiden.

#### **4.1 Keterlibatan Perempuan dalam Politik Prancis Masa Kekuasaan Partai Sosialis: Presiden François Mitterrand**

Dalam pemilu presiden 1981 putaran pertama dua calon presiden, Valéry Giscard d'Estaing dan François Mitterrand, memperoleh suara terbanyak.<sup>47</sup> Kandidat perempuan dalam pemilu ini lebih banyak dari pemilu presiden 1974. Ada tiga perempuan yang menjadi kandidat presiden, yaitu Arlette Laguiller dari partai Lutte Ouvrière, Marie-France Garaud yang merupakan calon independen, dan Hugutte Bouchardeau. Dua nama terakhir menempati peringkat terakhir dalam pemilu presiden 1981 dengan hanya memperoleh 1,33% suara (France Garaud) dan 1,10% (Bouchardeau) (Winnock, 91). Walaupun hanya memperoleh suara kecil, namun keduanya dianggap telah mewakili kaum perempuan dalam pemilihan umum tertinggi di Prancis.

Putaran kedua pemilu presiden dimenangkan François Mitterrand dengan perolehan suara 51,75% (Winnock, 94). Inilah untuk pertama kalinya sepanjang Republik V, golongan kiri berkuasa dalam pemerintahan. François Mitterrand resmi menjadi presiden pada tanggal 21 Mei 1981 (Winnock, 96).

Dalam sub-bab ini pembahasan tentang perempuan dalam kabinet François Mitterrand dibagi dua, yaitu pada periode pertama (1981-1988) dan periode kedua (1988-1995). Pemisahan dalam sub-bab didasarkan pada kebijakan François Mitterrand tentang perempuan yang berbeda pada kedua masa jabatannya.

##### **4.1.1 Periode Pertama Presiden François François Mitterrand (1981-1988)**

Terpilihnya François Mitterrand juga tidak lepas dari dukungan perempuan. Untuk pertama kalinya pada Republik V perempuan memberikan lebih banyak suaranya untuk golongan kiri (diwakili François Mitterrand) dalam pemilu presiden (Kaufmann-Mc-Call, 282).<sup>48</sup> Di samping itu beberapa organisasi feminis di Prancis, seperti Psych et Po dan MLF, mendukung François Mitterrand selama kampanye presiden (Kaufmann- McCall, 289).

<sup>47</sup>Valéry Giscard d'Estaing meraih 28,31% sedangkan François Mitterrand meraih 25,84%. Kedua calon presiden ini maju ke putaran kedua pemilu presiden 1981 (Winnock, 91).

<sup>48</sup>51% perempuan memilih François Mitterrand pada pemilu presiden 1981. Hasil ini merupakan persentase terbanyak dibandingkan dengan persentase tahun 1974 (47%), dan 1965 (39%) (Rudelle, 64)

Salah satu janji kampanye François Mitterrand sebagai calon presiden adalah menunjuk menteri khusus untuk pemberdayaan perempuan.<sup>49</sup> Ia juga berjanji untuk memberikan kuota 30% bagi perempuan di parlemen daerah (Bereni, Reveillard, 11). Janji ini direalisasikan lewat Yvette Roudy, *ministre délégué* bidang pemberdayaan perempuan. Selama tahun 1981, salah satu program Yvette Roudy adalah mensosialisasikan penggunaan kontrasepsi kepada masyarakat, khususnya perempuan. Yvette Roudy mensosialisasikan kontrasepsi lewat iklan layanan masyarakat.<sup>50</sup>

Kebijakan lain adalah mencegah dan mengatasi kekerasan terhadap perempuan, dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat (seperti di tempat kerja). Kekerasan mencakup perlakuan seperti pelecehan dan perkosaan. Pemerintah juga berusaha untuk menekan diskriminasi jabatan di dalam pekerjaan bagi perempuan. Dalam hal promosi jabatan di perusahaan faktor gender tidak diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Pemerintah menghimbau pengambilan keputusan didasarkan pada kemampuan, tanpa memandang perbedaan gender.

Pemerintah menetapkan kuota 25% perempuan dalam pemilu legislatif untuk *conseillers municipal* bagi kota yang berpenduduk lebih dari 3.500 jiwa. Kuota ini ditetapkan pada tahun 1982. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan keterlibatan perempuan, baik tingkat municipal, pada khususnya, maupun politik Prancis pada umumnya (Hurtig, Mossuz-Lavau, dan Sineau, 2513).

Tahun 1983 Yvette Roudy menyuarkan program anti sexisme, yaitu eksploitasi tubuh perempuan di berbagai media. Hal ini memicu penolakan dari berbagai pihak, terutama media massa (Kaufmann-McCall, 290). Yvette Roudy dianggap membatasi kebebasan berekspresi dan tidak menghargai Prancis sebagai negara yang mencintai keindahan. Yvette Roudy tetap melaksanakan program ini.

<sup>49</sup>Janji François Mitterrand ketika diundang oleh organisasi feminis, *Choisir*, untuk menjelaskan tentang kampanye calon presiden bagi perempuan sebulan sebelum pemilu presiden tahun 1981 yang diadakan tanggal 26 April 1981 (Kaufmann-McCall, 289)

<sup>50</sup>Prancis telah melegalkan penggunaan kontrasepsi tahun 1967 namun belum pernah ada iklan tentang penyuluhan kontrasepsi. Hal ini karena berlawanan dengan program pemerintah untuk meningkatkan populasi Prancis. Ketika Yvette Roudy menjabat sebagai menteri pemberdayaan perempuan pertama kalinya iklan layanan masyarakat tentang kontrasepsi ditayangkan di televisi Prancis pada tanggal 9 Desember 1981 (<http://www.nytimes.com/1981/11/29/world/birth-control-ads-make-debut-on-french-tv.html>)

Salah satu caranya dengan mengawasi buku-buku, khususnya bagi anak sekolah, yang mengandung hal-hal berbau *sexisme* (Hurtig, Mossuz-Lavau, dan Sineau, 2513).

Kebijakan lain yang dikeluarkan oleh Yvette Roudy adalah aturan tentang pelarangan diskriminasi dalam bidang profesi. Tanggal 14 Juli 1983, Yvette Roudy mengeluarkan aturan yang dikenal dengan *Loi Roudy* (Sarde, 932).<sup>51</sup> Dalam aturan baru ini tidak diperbolehkan adanya batasan profesi bagi perempuan. Perempuan dan laki-laki juga mendapat perlakuan yang sama dalam dunia kerja.

Selain menteri pemberdayaan perempuan François Mitterrand juga menunjuk beberapa perempuan untuk menduduki jabatan di kabinet. Pertama kalinya perempuan ditunjuk sebagai *ministre d'état*. Nicole Questiaux adalah perempuan pertama yang menjabat sebagai *ministre d'état*, dalam kabinet François Mitterrand. Ia menjabat sebagai *ministre d'état* bidang solidaritas nasional (<http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/gvt5rep.asp>). Beberapa bidang yang penting bagi Prancis, seperti ekonomi, pertahanan, dan hubungan luar negeri, dipercayakan kepada perempuan. Catherine Lalumière pernah menjabat sebagai *ministre de la consommation* (1981-1984) dan *secrétaire d'état* hubungan luar negeri menangani hubungan luar negeri, khususnya hubungan dengan negara-negara Eropa (1984-1986). Ia menduduki jabatan tersebut karena kapasitasnya yang dianggap mampu menduduki jabatan tersebut. Selain Cathrine Lalumière masih ada perempuan lain yang dipercaya menduduki jabatan setara menteri, yaitu Edwige Avice. Ia dianggap mampu untuk menduduki jabatan *secrétaire d'état* bidang pertahanan (1984). *Secrétaire d'état* bidang pertahanan biasanya dijabat oleh laki-laki. Kemampuan yang luar biasa dari Edwige Avice mendorong François Mitterrand untuk memberikan jabatan yang penting ini.

Di luar kabinet pemerintahan, partisipasi perempuan dalam parlemen juga meningkat dibandingkan era presiden sebelumnya. Tahun 1981 perempuan yang duduk sebagai anggota *Assemblée Nationale* sekitar 5% (Hurtig, Mossuz-Lavau,

---

<sup>51</sup>La Loi 83-635 du 13 juillet 1983 terdiri 21 *article* yang dibagi dalam dua bagian. Pada bagian pertama berisi tentang kesetaraan hak dan pada bagian kedua menjelaskan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama dalam pekerjaan (<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT00000504474&dateTexte=20080116>; Sadre, 932)

dan Sineau, 2513). Pada era pemerintahan pertama presiden François Mitterrand terdapat tiga perempuan yang menjabat sebagai wakil ketua Assemblée Nationale, yaitu Colette Privat, Marie Jacq (keduanya tahun 1981), dan Louise Moureau (1983) (<http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/femmes/vice-presidente.asp>).<sup>52</sup>

Pada tahun 1983 jumlah perempuan dalam pemerintah daerah mencapai 14%, naik dua kali lipat dibandingkan tahun 1977 (Hurtig, Mossuz-Lavau, dan Sineau, 2514). Sedangkan tahun 1986 jumlah kandidat perempuan di pemilu legislatif tingkat mencapai 25% (Hurtig, Mossuz-Lavau, 2514). Angka abstain bagi pemilih perempuan juga menurun dibandingkan Republik IV, yang mencapai 24% (Mossuz-Lavau (1993), 674). Pada pemilu presiden 1981 putaran pertama 12 % perempuan abstain. Sedangkan pada pemilu presiden putaran kedua hanya 5% orang perempuan yang abstain (Mossuz-Lavau (1993), 674).

#### **4.1.2 Periode Kedua Masa Presiden François François Mitterrand (1988-1995)**

Pada pemilu presiden tahun 1988 François Mitterrand unggul dari lawan-lawannya. Putaran pertama pemilu François Mitterrand memperoleh 34,11%, jauh dari saingan terdekatnya, Jacques Chirac, yang hanya memperoleh 19,96% suara (Winnock, 106). Sedangkan putaran kedua, François Mitterrand memperoleh 54,02% suara (Winnock, 109). Hasil ini mengantarkannya menjadi presiden Prancis untuk kedua kalinya.

Mandat kedua sebagai presiden, François Mitterrand justru meniadakan jabatan *ministre délégué* pemberdayaan perempuan yang sebelumnya dijabat Yvette Roudy. Sebagai gantinya masalah perempuan hanya diserahkan kepada *secrétaire d'état*, Michèle André, dan Véronique Neietz (<http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/gvt5rep.asp>). Bahkan pada jabatan perdana menteri Edouard Balladur<sup>53</sup> tidak ada jabatan dalam kabinet yang mengurus masalah perempuan (<http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/gvt5rep.asp>).

<sup>52</sup> Jumlah wakil ketua Assemblée Nationale adalah enam orang.

<sup>53</sup> Edouard Balladur menjabat sebagai perdana menteri Prancis pada tanggal 29 Maret 1993 hingga 11 Mei 1995. Sebelumnya ia menjabat sebagai *ministre d'état* bidang ekonomi dan industri. Balladur berasal dari partai Union pour le Mouvement Populaire yang pada masa François Mitterrand masih bernama Rassemblement pour la République

Periode kedua kepresidenan François Mitterrand ini pertama kalinya Prancis memiliki perdana menteri perempuan. Tahun 1991 Edith Cresson, kader partai sosialis dan tidak pernah absen menjabat sepanjang François Mitterrand menjadi presiden, diangkat sebagai perdana menteri. Dengan jabatan yang hanya berlangsung setahun, Edith Cresson membuat program pengurangan wajib militer dari 20 bulan menjadi enam bulan (<http://www.senat.fr/evenement/archives/D35gouv4.html>).

Sebelum menjadi perdana menteri, Edith Cresson pernah menjabat sebagai menteri pertanian<sup>54</sup>, serta menteri industri dan perdagangan.<sup>55</sup> Ia tidak pernah ditunjuk untuk menjabat sebagai menteri untuk bidang yang dekat dengan perempuan, seperti kesehatan dan pendidikan. Sepanjang pemerintahan Cresson enam perempuan dilibatkan dalam kabinetnya (<http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/gvt5rep.asp>), yaitu tiga menjadi menteri, dan tiga jabatan setara menteri, yaitu *ministre délégué* dan *secrétaire d'état*.

Pada tingkat lembaga legislatif, perwakilan perempuan dalam parlemen menurun dibandingkan periode pertama François Mitterrand menjabat sebagai presiden. Hanya 4,3% perempuan di parlemen pada tahun 1992 (Haase-Dubosc, 185). Di antara negara-negara Eropa, Prancis menempati urutan kedua terendah dalam hal representasi perempuan di parlemen, setelah Yunani.<sup>56</sup> Jumlah ini turun dibandingkan tahun 1988. Saat itu Prancis menempati urutan ke-17 dari 21 negara Eropa (Barat) dalam hal perwakilan perempuan di parlemen (Hurtig, Mossuz-Lavau, dan Sineau, 2513). Saat itu presentase-nya sekitar 5,7% (Hurtig, Mossuz-Lavau, dan Sineau, 2513).

Jumlah perempuan yang masih minim di parlemen memunculkan reaksi dari kaum perempuan. Tahun 1992 perempuan Eropa mengadakan konferensi di Athena, Yunani, yang isinya menuntut keadilan perempuan dalam politik (Haase-Dubosc, 185). Keadilan di sini menyangkut jumlah perempuan sebagai

---

([http://www.assemblee-nationale.fr/12/tribun/fiches\\_id/347.asp](http://www.assemblee-nationale.fr/12/tribun/fiches_id/347.asp))

<sup>54</sup>Edith Cresson menjabat sebagai menteri pertanian pada tahun 1981-1983 ([http://www.archives.premierministre.gouv.fr/villepin/acteurs/premier\\_ministre/histoire\\_chefs\\_gouvernement\\_28/edith\\_cresson\\_251/index.html](http://www.archives.premierministre.gouv.fr/villepin/acteurs/premier_ministre/histoire_chefs_gouvernement_28/edith_cresson_251/index.html))

<sup>55</sup>Edith Cresson menjabat sebagai menteri industri dan perdagangan pada tahun 1984-1986 ([http://www.archives.premier-ministre.gouv.fr/villepin/acteurs/premier\\_ministre/histoire\\_chefs\\_gouvernement\\_28/edith\\_cresson\\_251/index.html](http://www.archives.premier-ministre.gouv.fr/villepin/acteurs/premier_ministre/histoire_chefs_gouvernement_28/edith_cresson_251/index.html))

<sup>56</sup>Prancis berada di urutan dua terbawah dari dua belas negara Uni Eropa (Haase-Dubosc, 185)

anggota parlemen yang masih lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Hal ini berlaku pula pada jabatan yang diberikan kepada perempuan. Jabatan-jabatan penting di pemerintahan, seperti menteri ekonomi atau menteri pertahanan belum diserahkan kepada perempuan. Prancis diwakili Edith Cresson dan Simone Veil untuk menandatangani tuntutan ini yang dikenal dengan piagam Athena (*Athens Charter*).

Di tahun yang sama terbit buku berjudul “Au Pouvoir Citoyennes: Liberté, Égalité, Parité” yang ditulis oleh Françoise Gaspard, Claude Servan-Schreiber, dan Anne Le Gall.<sup>57</sup> Dalam buku ini dijelaskan bahwa parlemen yang terpilih seharusnya berisi perempuan dan laki-laki dengan jumlah yang seimbang. Sekitar setahun setelah penerbitan buku tersebut, tepatnya tanggal 10 November 1993, surat kabar *Le Monde* memuat deklarasi berjudul “Le Manifeste des 577 pour Démocratie Paritaire” (Haase-Dubosc, 186). Pernyataan ini ditandatangani oleh 577 orang: 289 perempuan dan 288 laki-laki, yang melambangkan jumlah anggota Assemblée Nationale.

Isi deklarasi ini menuntut persamaan hak bagi perempuan di parlemen. Mereka yang menandatangani deklarasi ini menilai representasi perempuan di parlemen nasional maupun daerah sangat sedikit, hanya sekitar 5%, padahal perempuan Prancis telah memberikan suara dalam pemilu sejak 1945. Negara juga dinilai tidak mengamalkan *Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen*, yaitu semua manusia mempunyai hak yang sama dalam hukum.

Di tingkat partai, jumlah kandidat perempuan di pemilu parlemen Eropa<sup>58</sup> tahun 1994, menyentuh setengah dari total kandidat yang diajukan setiap partai. Bahkan persentase kandidat perempuan di partai Komunis lebih dari setengah, yaitu 57,1%. Sedangkan kandidat perempuan dari partai Sosialis 46,6%, dan partai sayap kiri lainnya, Energie Radicale 38,4%. Partai sayap kanan, RPR,

<sup>57</sup>Françoise Gaspard adalah seorang sejarawan dalam bidang politik. Ia aktif dalam mendukung hak-hak perempuan dalam politik. Pernah menjabat sebagai perwakilan Prancis menangani masalah perempuan di PBB tahun 1998. ([http://www.un.int/france/frame\\_francais/france\\_et\\_onu/france\\_et\\_elections\\_a\\_onu/cv\\_gaspard.htm](http://www.un.int/france/frame_francais/france_et_onu/france_et_elections_a_onu/cv_gaspard.htm)). Jean-Claude Servan Schreiber adalah seorang jurnalis dan penulis essay. Pimpinan redaksi majalah *Psychologie*. Sedangkan Anne Le Gall adalah seorang jurnalis dan pembawa acara berita di Prancis stasiun Europe1.

<sup>58</sup>Setiap partai di Prancis mengajukan calon wakil rakyat yang akan duduk di parlemen Eropa. Pemilihan berdasarkan jumlah suara yang masuk ke partai. Artinya semakin banyak suara yang masuk ke partai, maka semakin besar pula kesempatan kandidat partai tersebut untuk duduk di parlemen Eropa mewakili Prancis (Haase-Dubosc, 188)

merupakan partai dengan persentase kandidat perempuan paling sedikit, hanya 21%. Jumlah ini bahkan lebih sedikit dari persentase kandidat perempuan dari partai tengah, Majorité pour l'autre Europe (23%) (Haase-Dubosc, 188).

Masa kepresidenan François Mitterrand yang kedua, meskipun keterlibatan perempuan terbilang lebih minim dibandingkan periode pertama kepresidenan, namun beberapa tokoh perempuan yang pernah menjabat dalam kabinet François Mitterrand menjadi kandidat calon presiden. Dua tokoh mantan menteri periode kedua kekuasaan François Mitterrand mencalonkan diri sebagai presiden.

a. Martine Aubry

Lahir tanggal 8 Agustus 1950 di Paris, Aubry merupakan salah satu kader partai Sosialis. Karirnya di pemerintahan diawali sebagai bagian dalam kementerian urusan sosial dan solidaritas nasional tahun 1983-1984 di bawah menteri Pierre Bérégovoy (<http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/gvt5rep.asp>)

Kemudian ia menjabat sebagai menteri tenaga kerja tahun 1991-1992. Pada saat itu Martine Aubry mencanangkan program penuntasan pengangguran dan menerapkan kontrol sosial mekemudiani inspeksi terhadap para pekerja. Tahun 1993 ia mendirikan FACE (*Fondation Agir Contre l'Exclusion*) yang bertujuan untuk mengurangi pengangguran dan memberikan akses untuk pekerjaan bagi masyarakat. Aubry pernah dua kali menjabat sebagai wali kota Lille.<sup>59</sup>

b. Ségolène Royal

Lahir tahun 1955 Ségolène Royal merupakan kader partai Sosialis yang pernah menjadi anggota legislatif mewakili Deux-Sèvres tahun 1988 hingga 1992, dan terpilih kembali tahun 1993 ([http://www.assemblee-nationale.fr/11/tribun/fiches\\_id/2650.asp](http://www.assemblee-nationale.fr/11/tribun/fiches_id/2650.asp)). Pada periode kedua presiden François Mitterrand ia menjadi menteri lingkungan hidup, pada masa perdana menteri Pierre Bérégovoy (1992-1993). Pada tahun 2007 Ségolène Royal menjadi calon presiden dari partai Sosialis. Ia melaju ke putaran kedua, namun akhirnya harus kalah dari Nicolas Sarkozy.

<sup>59</sup>Martine Aubry menjadi wali kota Lille tahun 2001, kemudian tahun 2008 (<http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7740513.stm>)

#### 4.2 Keterlibatan Perempuan dalam Politik Prancis masa Presiden Jacques Chirac (1995-2007)

Jacques Chirac terpilih sebagai presiden Prancis pada tanggal 7 Mei 1995 (Mossuz-Lavau (2005), 82). Ia mengalahkan Lionel Jospin pada putaran kedua, dengan perolehan suara 52,46% berbanding 47,36% (<http://www.france-politique.fr/election-presidentielle-1995.htm>). Saat pemilu presiden 1995 kesetaraan gender menjadi isu baru yang dibahas kandidat presiden (Mossuz-Lavau (2005), 82). Setiap kandidat presiden,<sup>60</sup> termasuk Jacques Chirac, menegaskan bahwa mewujudkan *parité*<sup>61</sup> adalah tujuan dari pemerintahan jika kelak terpilih sebagai presiden (Haase-Dubosc, 189).

Setelah terpilih sebagai presiden, Jacques Chirac mengangkat perdana menteri Alain Juppé. Masa PM Juppé dikenal dengan sebutan *les juppettes*.<sup>62</sup> Hal ini karena jumlah perempuan dalam kabinet ini cukup banyak, mencapai 27% (<http://8mars-online.fr/les-jupettes?lang=fr>). Mereka adalah Elisabet Hubert sebagai menteri kesehatan, Colette Codaccioni sebagai menteri solidaritas, Corine Lepage sebagai menteri lingkungan hidup, Anne-Marie Couderc sebagai *secrétaire d'état* bidang ketenagakerjaan, Elisabet Dufourcq sebagai *secrétaire d'état* bidang pengajaran dan penelitian, Nicole Ameline sebagai *secrétaire d'état* bidang desentralisasi, Anne-Marie Idrac sebagai *secrétaire d'état* bidang transportasi, Françoise Hostalier sebagai *secrétaire d'état* bidang pendidikan nasional, dan Margie Sudre sebagai *secrétaire d'état* bidang francophonie (<http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/gvt5rep.asp>)

Selain itu pada masa Juppé pemerintah membuat Observatoire de la Parité. Observatoire de la Parité adalah sebuah komite yang dibentuk dengan tujuan memberi informasi serta mendukung kesetaraan gender dan hak-hak perempuan di politik, ekonomi, dan sosial. Ketika pertama kali berdiri tahun 1995, Observatoire de la Parité diketuai oleh Roselyne Bachelot. Anggota dari komite ini tidak hanya perempuan, namun juga laki-laki. Anggota-anggota ini dipilih berdasarkan

<sup>60</sup>Kandidat presiden pemilu presiden 1995 adalah Lionel Jospin, Jacques Chirac, Edouard Balladur, Jean Marie Le Pen, Robert Hue, Arlette Laguiller, Philippe de Villiers, Dominique Voynet, dan Jacques Cheminade (<http://www.france-politique.fr/election-presidentielle-1995.htm>)

<sup>61</sup>*Parité* adalah Egalisasi dalam hal representasi perempuan dan laki-laki di politik (<http://www.larousse.fr/encyclopedie/nom-commun-nom/parité/77059>)

<sup>62</sup>Dalam bahasa Prancis *juppettes* berarti rok pendek

kompetensi mereka dalam bidang yang berkaitan dengan kesetaraan gender. Masa jabatan anggota tiga tahun.

Pada bulan Desember 1996 komite ini mengeluarkan laporan tentang perempuan dalam politik. Hasilnya konsep kesetaraan gender tidak benar-benar diterapkan dalam politik (Haase-Dubosc, 189). Misalnya dalam hal perwakilan perempuan di parlemen. Mayoritas partai politik hanya melihat jumlah kandidat calon legislatif perempuan dan laki-laki yang sama, namun tidak melihat bidang-bidang yang diserahkan untuk kandidat perempuan. Bagi partai-partai politik yang paling pelting hanyalah menempatkan sebanyak mungkin perempuan, tanpa peduli apakah perlu menempatkan perempuan dalam bidang tersebut.

Tahun 1997 pemilu legislatif dimenangkan oleh partai kiri. Sebanyak 63 perempuan menjadi anggota dewan di *Assemblée Nationale* (Haase-Dubosc, 192). Jumlah ini sekitar 10,9% dari keseluruhan anggota *Assemblée Nationale*. Kemenangan ini berdampak pada penunjukan perdana menteri baru dari partai kiri, Lionel Jospin, dari partai Sosialis. Lionel Jospin mengangkat delapan perempuan<sup>63</sup> dari 28 menteri dan *secrétaire d'état* (Haase-Dubosc, 192).

Tanggal 8 Desember 1999 pemerintah menyatakan bahwa untuk pemilu bagi daerah yang berpenduduk lebih dari 3500 orang, jumlah kandidat perempuan dan kandidat laki-laki harus seimbang, 50%. Partai politik juga diharuskan untuk mengajukan kandidat perempuan dan laki-laki dengan kuota masing-masing 50%. Sanksi finansial akan diberikan kepada partai yang tidak mengikuti aturan ini (Mossuz-Lavau (2002),48). Prancis merupakan negara pertama yang menyertakan kuota 50% untuk perempuan dalam politik. Negara-negara lain maksimal hanya 33% (Mossuz-Lavau (2002), 48).

Setahun kemudian parlemen mengeluarkan undang-undang tentang hak yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam politik. Undang-undang ini,

---

<sup>63</sup>Delapan perempuan dalam kabinet Lionel Jospin (1997-2002): Martine Aubry sebagai menteri tenaga kerja, Elisabeth Guigou sebagai menteri hukum, Cathrine Trautmann sebagai menteri kebudayaan dan juru bicara pemerintah, Cathrine Tosca sebagai menteri kebudayaan dan komunikasi, Dominique Voynet sebagai menteri lingkungan, Marie-George Buffet sebagai menteri pemuda dan olahraga, Ségolène Royale sebagai *ministre délégué* bidang pendidikan, Nicole Péry sebagai *secrétaire d'état* bidang tenaga kerja, dan Marylise Lebranchu sebagai *secrétaire d'état* bidang keuangan (<http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/gvt5rep.asp>)

tertanggal 6 Juni 2000,<sup>64</sup> terdiri dari dua puluh pasal. Inti dari undang-undang ini adalah laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam politik, termasuk dalam mencalonkan diri sebagai kandidat untuk pemilu, baik tingkat lokal maupun nasional ([www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT00000400185](http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT00000400185)).

Selama setahun terakhir masa jabatan Lionel Jospin sebagai perdana menteri, dikeluarkan beberapa aturan yang melindungi hak-hak perempuan. Tanggal 9 Mei 2001 dikeluarkan undang-undang yang dikenal dengan *Loi Génisson*.<sup>65</sup> Isi undang-undang ini adalah tentang kesetaraan perempuan dalam dunia kerja, dan keterlibatan perempuan dalam bidang politik (<http://www.assemblee-nationale.fr/11/propositions/pion2132.asp>)

Meskipun ada aturan tentang persentase yang seimbang antara perempuan dan laki-laki, hal ini tidak terlaksana. Di Assemblée Nationale tahun 2002 hanya ada 12,3% perempuan sebagai anggota legislatif (Mossuz-Lavau (2005), 85). Sedangkan Sénat hanya mengakomodasi 17% senator perempuan (Mossuz-Lavau (2005), 84). Pada tingkat partai, kurang dari 20% kandidat perempuan dari UMP untuk duduk di kursi legislatif (Moossuz-Lavau (2005), 85). Sedangkan partai Sosialis hanya menyertakan 36,13% kandidat perempuan. Kedua partai ini mendapat sanksi finansial. UMP mendapat sanksi finansial lebih dari empat juta euro, sedangkan partai Sosialis sekitar satu juta euro (Mossuz-Lavau (2005), 85).

Dibandingkan negara-negara Eropa (Barat) lain, Prancis termasuk paling sedikit menyertakan perempuan sebagai anggota parlemen. Berdasarkan data sebelum tanggal 1 Mei 2004, perempuan di parlemen Prancis hanya 17%. Dari persentase perempuan di parlemen, posisi Prancis di bawah Britania Raya (18%), Spanyol (36%), dan Jerman (32%). Bahkan sangat ketinggalan dari negara-negara Skandinavia, seperti Denmark (38%) Swedia (45%) (Mossuz-Lavau (2005), 85).

---

<sup>64</sup> Loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives (<http://www.assemblee-nationale.fr/dossiers/parite/mandats.asp>)

<sup>65</sup> *Loi Génisson* dibacakan oleh Catherine Génisson yang waktu itu menjabat sebagai anggota legislatif mewakili *région* Nord-Pas-de-Calais. Terdiri dari 34 pasal. Semua pasal mengatur tentang kesetaraan perlakuan antara perempuan dan laki-laki di dunia kerja, juga dalam hal politik, seperti pencalonan sebagai anggota legislatif (<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000756495>)

Di tingkat daerah, berdasarkan data kementerian dalam negeri tahun 2001, tercatat 33% anggota legislatif daerah adalah perempuan (Mossuz-Lavau (2002), 52).<sup>66</sup> Pada tahun yang sama jumlah perempuan yang menjadi wali kota di Prancis sekitar 10,8% (Mossuz-Lavau (2002) 58). Sedangkan pada tahun 2004 jumlah ini turun menjadi 5,4% perempuan yang menjabat sebagai wali kota (Mossuz-Lavau (2005), 85).

Pada masa pemerintahan Jacques Chirac pandangan tentang perempuan dalam politik mulai bergeser. Jika sebelumnya perempuan dalam politik termasuk dalam feminisme, maka sejak era ini anggapan itu berubah. Feminis menolak istilah *parité*<sup>67</sup> (Haase-Dubosc, 193). Feminis beranggapan *parité* hanyalah suatu taktik dari partai politik untuk mendapatkan suara di pemilu.

*Parité* dalam anggapan para feminis adalah bentuk dari pengkotak-kotakkan gender (*la différence de sexe*) (Haase-Dubosc, 193). Mereka beranggapan bahwa perempuan tetap menjadi sub-ordinat dari laki-laki. Kekuasaan tetap berada di tangan laki-laki. Jadi dalam *parité* perempuan 'ditunjuk' oleh laki-laki dan mereka tidak bisa berkuasa atas diri sendiri maupun lingkungannya.

Anggapan inilah yang akhirnya menciptakan perbedaan dalam hal gerakan feminis dan perempuan dalam politik. Politikus perempuan memperjuangkan hak-hak perempuan, tapi mereka tidak melihat *parité* sebagai sebuah pengkotak-kotakkan gender. Mereka melihat inilah peluang perempuan untuk berkembang, khususnya dalam politik.

Masa Jacques Chirac mencatat perempuan dalam politik tidak hanya didominasi partai kiri. Beberapa perempuan politikus berasal dari partai kanan. Bahkan tidak sedikit yang nantinya mendapat jabatan yang penting dalam kabinet. Mereka antara lain:

a. Michèle Alliot-Marie

Pada masa presiden Jacques Jacques Chirac Alliot-Marie menjabat sebagai menteri pertahanan tahun 2002. Ini adalah salah satu jabatan terpenting dalam

<sup>66</sup> Tingkat *municipal*

<sup>67</sup> *Parité* adalah egalisasi antara perempuan dan laki-laki dalam dunia kerja, termasuk juga dalam hal politik

kabinet, selain menteri keuangan dan menteri luar negeri. Ia merupakan kader partai bentukan Jacques Chirac, *Rassemblement Pour la République* (RPR), yang nantinya berubah menjadi *Union pour le Mouvement Populaire* (UMP). Alliot-Marie, seorang sarjana hukum, mengawali karir politiknya tahun 1986 dengan menjadi anggota legislatif mewakili *Pyrénées-Atlantiques* (<http://lci.tf1.fr/biographies/michele-alliot-marie-4883739.html>). Ia kemudian aktif dalam kabinet sebagai *secrétaire d'état* dan menteri. Dalam kabinet presiden Nicolas Sarkozy, Alliot-Marie juga dipercaya sebagai menteri pertahanan.

b. Christine Lagarde

Lahir tahun 1956, Christine Lagarde mengawali karirnya di dunia hukum. Ia bekerja di beberapa firma hukum di Prancis sejak tahun 1981. Namanya dikenal ketika ia berkarir di Amerika Serikat. Lagarde bergabung dengan Baker&McKenzie, salah satu firma hukum terbesar di AS yang berpusat di Chicago, sejak 1987. Jabatan terakhirnya adalah kepala Komite Eksekutif Global (*Global Executive Comitee*) tahun 2004. Lagarde berperan besar menjadikan Baker&McKenzie memperoleh profit besar, hingga menyentuh 1,3 milyar dollar ([www.minefe.gouv.fr/ministere\\_finances/lagarde.htm](http://www.minefe.gouv.fr/ministere_finances/lagarde.htm)).

Tahun 2005 ia kembali ke Prancis, menjabat sebagai *secrétaire d'état* bidang keuangan. Lagarde bergabung dengan partai RPR. Pada kabinet presiden Nicolas Sarkozy ia menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai menteri keuangan.

Pada tahun terakhir kekuasaan Jacques Chirac, diadakan pemilu untuk memilih presiden untuk masa jabatan 2007-2012. Dari dua belas calon, empat di antaranya perempuan (Winnock, 233-234). Mereka adalah Ségolène Royal, Marie-George Buffet, Dominique Voynet, dan Arlette Laguiller. Pemilu presiden utaran pertama dimenangkan oleh Ségolène Royal dan Nicolas Sarkozy.<sup>68</sup> Kedua kandidat maju ke putaran kedua. Inilah untuk pertama kalinya perempuan melaju hingga putaran kedua pemilu presiden di Prancis. Dalam sebuah jajak pendapat yang diadakan koran *Le Parisien* bulan Januari 2007, Ségolène Royal dipilih oleh 52% pemilih, sedangkan Nicolas Sarkozy 48% (Winnock, 240). Namun hasil

<sup>68</sup>Nicolas Sarkozy dari partai UMP meraih 31,11% suara sedangkan Ségolène Royal dari partai Sosialis meraih 25,83% suara (Winnock, 233)

yang berbeda ditunjukkan pada pemilu tanggal 6 Mei 2007. Sarkozy menang dengan suara 53,06%, sedangkan Royal 46,94% (<http://www.france-politique.fr/election-presidentielle-2007.htm>).

Dari penjelasan dalam bab ini terlihat bahwa François Mitterrand memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan perempuan dalam politik Prancis. Ia mengeluarkan beberapa kebijakan yang berpihak pada perempuan. Kebijakan pada masa kekuasaan François Mitterrand ini sangat membantu keberanian perempuan untuk menuntut hak-haknya sekaligus berperan dalam politik. Hal ini terlihat dari statistik yang menunjukkan persentase perempuan di parlemen naik dibanding masa kekuasaan presiden sebelumnya.

Periode kedua kekuasaan François Mitterrand tidak banyak menitikberatkan pada isu perempuan. Keadaan ini terjadi karena pada masa itu terjadi beberapa peristiwa penting, seperti runtuhnya Uni Sovyet<sup>69</sup>, runtuhnya tembok Berlin dan reunifikasi Jerman<sup>70</sup>, perang Teluk<sup>71</sup>, serta berakhirnya Apartheid di Afrika Selatan<sup>72</sup>. Dengan peristiwa-peristiwa internasional itu maka François Mitterrand fokus pada hubungan luar negeri. Hal ini dibuktikan dengan pengiriman tentara Prancis ke Irak pada tanggal 17 Januari 1991 ketika terjadi Perang Teluk ([http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/article\\_imprim.php3?id\\_article=5296](http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/article_imprim.php3?id_article=5296)).

Posisi perempuan dalam politik yang sudah baik di politik pada masa François Mitterrand (jika dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya) menjadi lebih baik lagi pada era Jacques Chirac. Jika dilihat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Jacques Chirac, sebenarnya ia tidak membuat suatu perubahan baru bagi perempuan. Ia hanya meneruskan apa yang telah dirintis François Mitterrand.

<sup>69</sup>Krisis Uni Sovyet berlangsung dari tahun 1987-1990. Dan secara resmi tanggal 24 September 1990 Uni Sovyet mengakhiri kekuasaan komunis dengan membuka akses pasar bebas (Stromberg, 414-417)

<sup>70</sup>Tembok Berlin diruntuhkan tanggal 9 November 1989 setelah 28 tahun memisahkan Jerman Barat dan Jerman Timur (pertama dibangun tahun 1961). Reunifikasi Jerman secara resmi tanggal 30 Juni 1990 (Stromberg, 419)

<sup>71</sup>Perang Teluk berlangsung dari tahun 1990-1991 setelah invasi Irak ke Kuwait (<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/452778/Persian-Gulf-War>)

<sup>72</sup>Apartheid di Afrika Selatan berakhir tahun 1994

Satu hal yang penting dari Jacques Chirac, presiden dari partai RPR ini adalah presiden yang berpikiran terbuka, setidaknya menyangkut masalah perempuan. Hampir sama dengan Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac melihat kiprah perempuan di politik yang cepat berkembang pada masa François Mitterrand sebagai suatu hal yang perlu diakomodasi, tapi tidak dengan drastis. Kebijakan-kebijakannya selama ini hanyalah 'turunan' dari kebijakan yang dibawa oleh François Mitterrand. Misalnya dalam masalah kuota. Jacques Chirac tidak menggagas kebijakan ini, tapi menambahkan jumlah kuota.



## BAB 5

### KESIMPULAN

Perempuan dalam kehidupan politik di Prancis menunjukkan perkembangan yang positif, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Sejak diberikan hak untuk memilih dalam pemilu, perempuan Prancis terus aktif dalam dunia politik. Hal ini terlihat dari jumlah perempuan dalam pemerintahan, parlemen, dan tokoh-tokoh politik perempuan yang jumlahnya semakin meningkat.

Sebelum François Mitterrand menjadi presiden telah terjadi peningkatan jumlah perempuan sebagai anggota legislatif dan menduduki jabatan di lembaga eksekutif. Dilihat dari data yang dipaparkan, peningkatan jumlah perempuan di parlemen dan lembaga eksekutif tidak terlalu signifikan, namun tidak terjadi penurunan yang drastis pula. Hanya pada masa kekuasaan Georges Pompidou, jumlah perempuan di parlemen sedikit menurun dibandingkan masa Republik IV dan masa presiden Charles de Gaulle.

Kebijakan tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia lewat program *rassemblement de la famille* menjadi alasan mengapa jumlah perempuan yang terlibat dalam dunia politik minim. Keadaan ini membuat media dan organisasi-organisasi perempuan mendorong perempuan untuk ikut serta dalam politik. Cara-cara yang digunakan adalah dengan menerbitkan artikel maupun dengan melakukan demonstrasi menuntut hak-hak kaum perempuan.

Ketika François Mitterrand menjadi presiden terlihat peningkatan yang signifikan dalam hal jumlah perempuan di pemerintahan dan parlemen. Selain itu dari data pemilu di pemilu, semakin sedikit perempuan yang abstain, dibandingkan masa kekuasaan presiden-presiden sebelum François Mitterrand. Pada masa itu posisi perempuan di kabinet juga semakin strategis. Perempuan mulai menduduki jabatan-jabatan di sektor penting, seperti ekonomi dan pertahanan.

Peningkatan ini terjadi karena pemerintah mendukung keterlibatan perempuan di politik. Hal ini ditunjukkan dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tentang perempuan. Kebijakan-kebijakan ini terkait ideologi yang dianut François Mitterrand, yaitu sosialisme, yang termasuk dalam

ideologi yang dianut partai kiri. Seperti dijelaskan pada penelitian ini, partai kiri memiliki pandangan mengenai perempuan, yaitu tidak ada diskriminasi gender. Pandangan ini sesuai dengan ideologi sosialisme dan komunisme, yaitu penghapusan kelas dalam masyarakat, sehingga tidak ada diskriminasi.

Apa yang dilakukan François Mitterrand menciptakan perubahan yang drastis bagi perempuan Prancis. Setelah François Mitterrand berkuasa, keterlibatan perempuan semakin besar di dunia politik. Pada masa presiden Jacques Chirac perempuan semakin banyak di parlemen. Meskipun berasal dari partai kanan, namun Jacques Chirac melanjutkan kebijakan yang telah dirintis François Mitterrand. Hal ini berdampak pada peningkatan jumlah perempuan di kabinet dan parlemen pada dua kali masa kepemimpinan Jacques Chirac. Beberapa perempuan yang terlibat di kabinet masa presiden François Mitterrand juga terpilih lagi dalam kabinet pada masa kekuasaan Jacques Chirac.

Dari pembahasan dalam penelitian ini ada satu catatan penting mengenai keterlibatan perempuan Prancis dalam dunia politik. Prancis belum pernah memiliki menteri luar negeri perempuan dan presiden perempuan. Catherine Lalumière pada masa presiden François Mitterrand hanya menjabat sebagai *secrétaire d'état* hubungan luar negeri, dan bukan menteri. Padahal di dua bidang terpenting bagi Prancis, ekonomi dan pertahanan, perempuan pernah memegang jabatan sebagai menteri. Bahkan pada masa presiden Nicolas Sarkozy, dengan tujuh perempuan dari lima belas anggota kabinetnya, jabatan menteri luar negeri masih dipercayakan pada laki-laki. Padahal masa kekuasaan Nicolas Sarkozy pertama kalinya perempuan ditunjuk untuk jabatan menteri ekonomi, yaitu Christine Lagarde.

Sementara itu dalam hal presiden perempuan, Ségolène Royal adalah calon presiden perempuan bagi Prancis. Ia merupakan perempuan pertama yang lolos hingga putaran kedua pemilu presiden Prancis tahun 2007. Ia kalah dari Nicolas Sarkozy. Dari hasil jajak pendapat yang dipaparkan dalam penelitian ini, Ségolène Royal dipilih oleh lebih banyak suara ketimbang Nicolas Sarkozy. Hasil pemilu ternyata berbeda dari hasil jajak pendapat. Ségolène Royal kalah dengan selisih tipis dari Nicolas Sarkozy.

Melihat data di atas, sepertinya pemerintah dan rakyat Prancis masih belum memercayakan perempuan untuk menjadi wakil Prancis di dunia internasional. Jabatan menteri luar negeri yang diserahkan kepada laki-laki menjadi pertanda bahwa pemerintah belum terbuka terhadap perempuan untuk membawa nama Prancis di luar negeri. Rakyat Prancis juga belum siap untuk menerima pemimpin perempuan. Kandidat presiden Prancis perempuan hanya menang dalam sesi jajak pendapat, namun penerapannya di pemilu presiden belum terlaksana.



## DAFTAR REFERENSI

### BUKU

- Addinall, N.A. *French Political Parties*. Cardiff: University of Wales Press. 1995.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2004.
- Chapsal, Jacques. *La Vie Politique en France de 1940-1958*. Paris: Presses Universitaires de France. 1993.
- De Guthen, B, A.Martin, dan M.Niogret. *Les Institutions de La France*. Paris: Nathan, 1988.
- Duchen, Claire. *Women's Right and Women's Lives in France 1944-1968*. London: Routledge. 1994.
- Gardaie, Eliana. *La France, Vous Connaissez*. Paris: Librairie Marshal Didier. 1976
- Godechot, Jacques. *Les Constitutions de la France depuis 1789*. Paris: Garnier-Flamarion. 1970.
- Goubert, Pierre. *The Course of French History*. Trans. Maarten Ultee. London: Routledge, 1991. Trans. *Initiation à l'histoire de la France*, 1984.
- Kent, Sherman. *Writing History*. New York: Appleton Century Croft. 1967.
- Moten, Abdul Rashid dan Syed Serajul Islam. *Introduction to Political Science Second Edition*. Singapore: Thomson Learning. 2006.

Hinnewinkel, M.J, J.C Hinnewinkel, J.M Sivirine, dan M.Vincent. *Découvrir, Comparer, Connaître Histoire*. France: Fernand Nathan. 1983.

Nembrini, J.L, P. Polivka, dan J.Bordes. *Histoire*. Paris: Hachette Classiques. 1986

Stromberg, Roland. N. *Europe in The Twentieth Century Fourth Edition*. New Jersey: Prentice Hall. 1997.

Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. 1992.

Winnock, Michel. *L'Election Presidentielle en France 1958-2007*. Paris: Perrin. 2008.

#### **JURNAL**

Bereni, Laure dan Anne Reveillard. “Des quotas à la parité : « féminisme d'État » et représentation politique (1974-2007).” *Genèses*, No.67. (2007/2). 5-23.

Diunduh dari <<http://www.cairn.info/revue-geneses-2007-2-page-5.htm>>

Danéchère, Yves. “La place et le rôle des femmes dans la politique étrangère de la France contemporaine”. *Vingtième Siècle. Revue d'histoire*, no.78 (April-Juni, 2003). 89-98. Diunduh dari <<http://www.jstor.org/stable/3772573>>

Ezekiel, Judith. “Radical in Theory: Organized Women’s Studies in France, Women’s Movement, and The State”. *Women’s Studies Quarterly*, Vol.20 No.3/4. (Fall, 1992). 75-84. Diunduh dari <[www.jstor.org/stable/4000375](http://www.jstor.org/stable/4000375)>

Fields, A.Belden. “Liberté, Égalité, & Surtout, Fraternité?: The Struggle over Women’s Liberation in the French Communist & Socialist Parties.” *Polity*, Vol.18, No.4. (Summer, 1986). 553-576.

Diunduh dari <[www.jstor.org/stable/3234882](http://www.jstor.org/stable/3234882)>

**Universitas Indonesia**

- Haase-Dubosc, Danielle. "Sexual Difference and Politic in France Today".  
*Feminist Studies*. Vol.25 No.1 (Spring, 1999). 183-210.  
 Diunduh dari <[www.jstor.org/stable/3216623](http://www.jstor.org/stable/3216623)>
- Hubac, Sabrina. "Des femmes aux élections législatives en France de 1945 à 1968: veuves d'hommes politiques célèbres et femmes d'inéligibles."  
*Parlement[s], Revue d'histoire politique*, no. 3. (2005). 94-113.  
 Diunduh dari <<http://www.cairn.info/revue-parlements-2005-1-page-94.htm>>
- Hurtig, Cristiane, Janine Mossuz-Lavau, dan Mariette Sineau. "'Might it Right': Feminist Movement in France: Achievements and Shortcomings". *Economic and Political Weekly*, Vo.24 no.44-45. (4-11 November 1989). 2505-2509+2511+2513+2516. Diunduh dari <[www.jstor.org/stable/4395559](http://www.jstor.org/stable/4395559)>
- Jenson, Jane. "Le féminisme en France depuis mai 68." *Vingtième Siècle Revue d'histoire*, no.24. (Oktober-Desember 1989). 55-68. Diunduh dari <[http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/xxs\\_0294-1759\\_1989\\_num\\_24\\_1\\_2185](http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/xxs_0294-1759_1989_num_24_1_2185)>
- Kaufmann-McCall. "Politics of Difference: The Women Movement in France from May 1968 to François Mitterrand." *Signs*. Vol.9 No.2. (Winter, 1983). 282-283. Diunduh dari <[www.jstor.org/stable/3173782](http://www.jstor.org/stable/3173782)>
- Mossuz-Lavau, Janine. "Le vote des femmes en France (1945-1993)." *Revue française de science politique*, 43e année, n°4. (1993). 673-689. Diunduh dari <[http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfsp\\_0035-2950\\_1993\\_num\\_43\\_4\\_396218](http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfsp_0035-2950_1993_num_43_4_396218)>

Mossuz-Lavau, Janine , “La parité en politique, histoire et premier bilan”

*Travail, genre et sociétés*, No. 7 (2002/1). 41-57.

Diunduh dari <<http://www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-2002-1-page-41.htm>>

Mossuz-Lavau, Janine. “Histoire et enjeux de la loi sur la parité”. *Projet*, No. 287.

(2005/4). 80-86. Diunduh dari <<http://www.cairn.info/revue-projet-2005-4-page80.htm>>

Rudelle, Odile. “Le vote des femmes et la fin de “L’exception Française.”.

*Vingtième Siècle Revue d’histoire*, No.42 (April-Juni, 1994). 52-65.

Diunduh dari <[www.jstor.org/stable/3771214](http://www.jstor.org/stable/3771214)>

Sarde, Michèle. “L’ Action du ministère du droit de la Femme, 1981-1986: un

Bilan”. *The French Review*, Vol. 61 No.6. (Mei 1988). 931-941.

Diunduh dari <[www.jstor.org/stable/394967](http://www.jstor.org/stable/394967)>

#### **PUBLIKASI ELEKTRONIK**

“1973 et 1979: les deux choc pétrolier.” *Sénat*.

<<http://www.senat.fr/rap/r05-105/r05-1051.html>> Diunduh pada tanggal 7 Juli 2011 pukul 10.30.

“1982 : du droit commun au premier statut particulier.” Collectivité Territoriale de

Corse. 2 Mei 2010. < [http://www.corse.fr/1982-du-droit-commun-au-premier-statut-particulier\\_a392.html](http://www.corse.fr/1982-du-droit-commun-au-premier-statut-particulier_a392.html)> Diunduh pada tanggal 11 Juli 2011 pukul 10.45

“Acces to Contraception.”

<<http://www.france.fr/en/living/health/health-system/service/access-contraception>> Diunduh pada tanggal 5 Juli 2011 pukul 07.02

“Alice Saunier-Seïté.” *Rectorat de Reims*.

<[http://www.crdpreims.fr/ressources/dossiers/bicentenaire\\_rectorat/panneau17.htm](http://www.crdpreims.fr/ressources/dossiers/bicentenaire_rectorat/panneau17.htm)>. Diunduh pada tanggal 6 Juli 2011 pukul 15.26

“Andrée, Marie, Mathilde, Viénot (Née Mayrisch).” *Assemblée Nationale*.

<<http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/biographies/IVRepublique/vienot-nee-mayrisch-andree-marie-mathilde-07061901.asp>> Diunduh pada tanggal 11 Mei 2011 pukul 10.46

Assemblée Nationale. *L'Assemblée Nationale dans Les Institutions Françaises*.

November 2009. <[http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/fiche\\_synthese\\_fiche\\_1.asp](http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/fiche_synthese_fiche_1.asp)>. Diunduh pada tanggal 9 Maret 2011 pukul 11:34

“Birth Control Ads Make Debut on French TV.” *The New York Times*. 29

Desember 1981. <<http://www.nytimes.com/1981/11/29/world/birth-control-ads-make-debut-on-french-tv.html>> Diunduh pada tanggal 7 Juli 2011 pukul 10.58

“Cécile Brunschvicg.” *Bibliothèque Universitaire d'Angers*. 30 April 2001.

<<http://bu.univ-angers.fr/EXTRANET/CAF/catalogue/Brunschvicg.html>> Diunduh pada tanggal 2 Juli 2011 pukul 18.14

“Christine Lagarde. Ministre de l'Économie, de l'Industrie, et de l'Emploi.”

*Ministère de l'Économie des Finances et de l'Industrie*. 6 Oktober 2009. <[http://www.minefe.gouv.fr/ministere\\_finances/lagarde.htm](http://www.minefe.gouv.fr/ministere_finances/lagarde.htm)> Diunduh pada tanggal 23 Mei 2011 pukul 17.26

“Comité Français de Libération Nationale.”. *Assemblée Nationale*.

<<http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/gprf.asp#ACPalger>>. Diunduh pada tanggal 20 Februari 2011 pukul 12.26.

- “Democracy.” *Encyclopaedia Britannica*. Encyclopaedia Britannica Online.  
<<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/157129/democracy>> Diunduh  
pada tanggal 10 Juli 2011 pukul 20.45
- “Edouard Balladur.” *Assemblée Nationale*.  
<[http://www.assemblee-nationale.fr/12/tribun/fiches\\_id/347.asp](http://www.assemblee-nationale.fr/12/tribun/fiches_id/347.asp)>.  
Diunduh pada tanggal 7 Juli 2011 pukul 15.37
- “Election Législative 1978.” *Laurent Boissieu*.  
<<http://www.france-politique.fr/elections-legislatives-1978.htm>> Diunduh pada  
tanggal 9 Juli 2011 pukul 05.05
- “Election Présidentielle 1974.” *Laurent Boissieu*.  
<<http://www.france-politique.fr/election-presidentielle-1974.htm>> Diunduh  
pada tanggal 8 Juli 2011 pukul 20.30.
- “Election Présidentielle 1995.” *Laurent Boissieu*.  
<<http://www.france-politique.fr/election-presidentielle-1995.htm>> Diunduh  
pada tanggal 8 Mei 2011 pukul 20.27
- “Election Présidentielle 2002.” *Laurent Boissieu*.  
<<http://www.france-politique.fr/election-presidentielle-2002.htm>> Diunduh  
pada tanggal 23 Mei 2011 pukul 18.17
- “Election Présidentielle 2007.” *Laurent Boissieu*.  
<<http://www.france-politique.fr/election-presidentielle-2007.htm>> Diunduh  
pada tanggal 23 Mei 2007 pukul 18.32
- “Femmes vice-présidentes de l'Assemblée nationale depuis 1958.” *Assemblée  
Nationale*. <[http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/femmes/vice-  
presidentes.asp](http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/femmes/vice-presidentes.asp)> Diunduh pada tanggal 1 Mei 2011 pukul 08.09

“Feminism”. *Encyclopedia Britannica*. Encyclopedia Britannica Online. 2011.

<<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/724633/feminism>>

Diunduh pada tanggal 5 Juli 2011 pukul 11.13

“Françoise Giroud.” *Evène*.

<<http://www.evene.fr/celebre/biographie/francoise-giroud-437.php>>. Diunduh

pada tanggal 6 Juli 2011 pukul 15.16

“Germaine Poinso Chapuis.” *Assemblée Nationale*.

<<http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/biographies/IVRepublique/poinso-chapuis-germaine-06031901.asp>> Diunduh pada tanggal 11 Mei 2011 pukul

10.53

“Histoire de l’Algérie.” *Larousse Encyclopaedia*. Larousse Online.

<<http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Algérie/185573>>

Diunduh pada tanggal 3 Juli 2011 pukul 14.08

“La Troisième République.” *Assemblée*

*Nationale* <<http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/histoire-1870.asp>>

Diunduh pada tanggal 20 februari 2011 pukul 12.30

“Histoire de l’Assemblée Nationale. Gouvernement Provisoire et La Quatrième République.” *Assemblée Nationale*. <<http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/histoire-1946.asp>>

Diunduh pada tanggal 27 Maret 2011 pukul 19.50

“Irène Joliot-Curie.” *Evène*. <<http://www.evene.fr/celebre/biographie/irene-joliot-curie-21042.php>>

Diunduh pada tanggal 10 Juli 2011 pukul 19.45.

“Jean Luc Godard.” *The New York Times*.

<<http://movies.nytimes.com/person/91804/Jean-Luc-Godard/biography>>

Diunduh pada tanggal 9 Juli 2011 pukul 03.45

**Universitas Indonesia**

“La Biographie d’Edith Cresson.” *Archives du Premier Ministre*. République Française. 2 Juli 2004. <[http://www.archives.premier-ministre.gouv.fr/villepin/acteurs/premier\\_ministre/histoire\\_chefs\\_gouvernement\\_28/edith\\_cresson\\_251/index.html](http://www.archives.premier-ministre.gouv.fr/villepin/acteurs/premier_ministre/histoire_chefs_gouvernement_28/edith_cresson_251/index.html)> Diunduh pada tanggal 7 Juli 2011 pukul 16.26

“La Citoyenneté Politique des Femmes.” *Assemblée Nationale*. <[http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/femmes/citoyennete\\_politique\\_PARITE.asp](http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/femmes/citoyennete_politique_PARITE.asp)> Diunduh pada tanggal 1 Mei 2011 pukul 07.42

“La Citoyenneté Politique des Femmes. Le Vote et L’Égibilité des Femmes.” *Assemblée Nationale* <[http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/femmes/citoyennete\\_politique\\_chronologie.asp](http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/femmes/citoyennete_politique_chronologie.asp)> Diunduh pada tanggal 20 Februari 2011 pukul 12.30

“La Constitution-Préambule de la Constitution de 1946.” *Le Service Public de la Diffusion du Droit*. <<http://www.legifrance.gouv.fr/html/constitution/const02.htm>> Diunduh pada tanggal 28 April 2011 pukul 08.11

“Le Conseil de La République.” *Sénat*. <[http://www.senat.fr/histoire/conseil\\_republique.html](http://www.senat.fr/histoire/conseil_republique.html)> Diunduh pada tanggal 22 Maret 2011 pukul 12.55

“La Définition de la Citoyenneté.” *Direction de l’information légale et administrative de la république française*. 30 Mei 2006. <<http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/approfondissements/definition-citoyennete-pays-occidentaux.html>> Diunduh pada tanggal 2 Juli 2011 pukul 17.09

“La Guerre du Golfe.” *Le Ministère des Affaires Etrangères.*

<[http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/article\\_imprim.php3?id\\_article=5296](http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/article_imprim.php3?id_article=5296)>

Diunduh pada tanggal 10 Juli 2011 pukul 17.00

“La Loi 83-635 du 13 juillet 1983.” *Le Service Public de la Difussion du Droit.*

<<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504474&dateTexte=20080116>> Diunduh pada tanggal 23 Mei 2011 pukul 11.50

“Le secrétariat d’état à la condition féminine.” *Sénat.*

<<http://www.senat.fr/evenement/archives/D35/secretariat1.html>> Diunduh pada tanggal 6 Juli 2011 pukul 15.11

“Les Femmes entrent au Gouvernement.” *Sénat.*

<<http://www.senat.fr/evenement/archives/D35/gouv4.html>> Diunduh pada tanggal 1 April 2011 pukul 21.40

“Les Femmes Sénateurs.” *Sénat.*

<<http://www.senat.fr/evenement/archives/D25/pionn.html>> Diunduh pada tanggal 5 Juli 2011 pukul 10.35

“Les Jupettes.” *8 Mars.* <<http://8mars-online.fr/les-jupettes?lang=fr>>

Diunduh pada tanggal 17 Mei 2008 pukul 11.28

“Les Partis Politiques en France.” *France-Allemagne.*

<<http://www.france-allemagne.fr/Les-partis-politiques-en-France,2360.html#>>

Diunduh pada tanggal 21 Maret 2011 pukul 17.00

“Libéral.” *Larousse Encyclopaedia.* Larousse Online.

<<http://www.larousse.fr/encyclopedie/nom-commun-nom/liberal/65744>>

Diunduh pada tanggal 11 Juni 2011 pukul 15.26

“Loi du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de grossesse.”

*Assemblée Nationale.*

<<http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/interruption/sommaire.asp>>.

Diunduh pada tanggal 28 Maret 2011 pukul 06.05

“Loi n°2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives.” *Le Service Public de la Diffusion du Droit*

<[www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000400185](http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000400185)>

Diunduh pada tanggal 19 Mei 2011 pukul 17.07

“Loi no.2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (1)” *Le Service Public de la Diffusion du Droit*

<<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000756495>>

Diunduh pada tanggal 23 Mei 2011 pukul 13.22

“Madame Françoise Gaspard.” *United Nations.*

<[http://www.un.int/france/frame\\_francais/france\\_et\\_onu/france\\_et\\_elections\\_a\\_onu/cv\\_gaspard.htm](http://www.un.int/france/frame_francais/france_et_onu/france_et_elections_a_onu/cv_gaspard.htm)>

Diunduh pada tanggal 7 Mei 2011 pukul 13.18

“Madeline Braun, née Weil.” *Assemblée Nationale.*

<<http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/biographies/IVRepublique/braun-nee-weil-madeleine-25061907.asp>>

Diunduh pada tanggal 8 Juli 2011 pukul 20.25

“Mme. Ségolène Royal.” *Assemblée Nationale.* <[http://www.assemblee-nationale.fr/11/tribun/fiches\\_id/2650.asp](http://www.assemblee-nationale.fr/11/tribun/fiches_id/2650.asp)>

Diunduh pada tanggal 8 Juli 2011 pukul 04.50

“Marie-Madeleine Dienesch.” *Sénat*.

<<http://www.senat.fr/evenement/archives/D35/dienesch.html>> Diunduh pada tanggal 28 Maret 2011 pukul 14.42

“Michèle Alliot-Marie.” *TF1*.

<<http://lci.tf1.fr/biographies/michele-alliot-marie-4883739.html>>  
Diunduh pada tanggal 23 Mei 2011 pukul 17.18

“MRP”. *Encyclopédie Universalis*. Encyclopédie Universalis Online.

<<http://www.universalis.fr/encyclopedie/mouvement-republicain-populaire/>>  
Diunduh pada tanggal 5 Juli 2011 pukul 16.35

“My Life to Live (1962).” *NY Times*.

<<http://movies.nytimes.com/movie/34073/My-Life-To-Live/overview>>.  
Diunduh pada tanggal 9 Juli 2011 pukul 04.50

“Neo-Fasism.” *Encyclopaedia Britannica*. Encyclopedia Britannica Online.

<<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/408862/neofascism>>  
Diunduh pada tanggal 3 Juli 2011 pukul 11.11

“Ordonnance”. *Larousse Encyclopaédia*. Larousse Online.

<[www.larousse.fr/encyclopedie/nom-commun-nom/ordonnance/75211](http://www.larousse.fr/encyclopedie/nom-commun-nom/ordonnance/75211)>.  
Diunduh pada tanggal 17 Maret 2011 pukul 10.22

“Parité.” *Larousse Encyclopaedia*. Larousse Online.

<<http://www.larousse.fr/encyclopedie/nom-commun-nom/parité/77059>>  
Diunduh pada tanggal 8 Juli 2011 pukul 05.10

“Parlement.” *Larousse Encyclopaedia*. Larousse Online.

<<http://www.larousse.fr/encyclopedie/nom-commun-nom/parlement/77077>>  
Diunduh pada tanggal 2 Juli 2011 pukul 20.26

“Persian Gulf War.” *Encyclopaedia Britannica*. Encyclopaedia Britannica Online.

<<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/452778/Persian-Gulf-War>>

Diunduh pada tanggal 8 Juli 2011 pukul 16.25

“Présidents de la République et Gouvernements sous la V<sup>e</sup> République.”

*Assemblée Nationale*. <<http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/gvt5rep.asp>>

Diunduh pada tanggal 27 Maret 2011 pukul 20.20

“Profile: Martine Aubry.” *BBC*. 22 November 2008.

<<http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7740513.stm>>. Diunduh pada tanggal 8 Juli

2011 pukul 04.45

“Réferendum: Quinquennat 2000.” *Laurent Boissieu*. <[http://www.france-](http://www.france-politique.fr/referendum-2000.htm)

[politique.fr/referendum-2000.htm](http://www.france-politique.fr/referendum-2000.htm)> Diunduh pada tanggal 13 Juli 2011 pukul

14.38.

“Régimes Politiques, Constitutions, et Législatures depuis 1789. Comité Français

de La Libération Nationale.” *Assemblée Nationale*. <[http://www.assemblee-](http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/legislatures-CFLN-Gouvernementprovisoire-et-constituantes.asp)

[nationale.fr/histoire/legislatures-CFLN-Gouvernementprovisoire-et-](http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/legislatures-CFLN-Gouvernementprovisoire-et-constituantes.asp)

[constituantes.asp](http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/legislatures-CFLN-Gouvernementprovisoire-et-constituantes.asp)>. Diunduh pada tanggal 4 Juli 2011 pukul 11.14

“Régimes Politiques, Constitutions, et Législatures depuis 1789. Quatrième

République.” *Assemblée Nationale*. <[http://www.assemblee-](http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/legislatures4rep.asp)

[nationale.fr/histoire/legislatures4rep.asp](http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/legislatures4rep.asp)> Diunduh pada tanggal 23 Maret 2011

pukul 17.50

“Républicain.” *Larousse Encyclopaedia*. Larousse Online.

<<http://www.larousse.fr/encyclopedie/nom-commun-nom/republicain/87682>>

Diunduh pada tanggal 11 Juni 2011 pukul 15.32

“Résistance.” *Larousse Encyclopaedia*. Larousse Online.

<<http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Résistance/138691>> Diunduh pada tanggal 30 April 2011 pukul

“Sexual revolution.” *Cambridge Dictionaries*. Cambridge Dictionaries Online.

<<http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/sexual-revolution>> Diunduh pada tanggal 9 Juli 2011 pukul 03.05

“Simone Veil.” *Elle France*. 4 Juni 2009.

<<http://www.elle.fr/elle/Personnalites/Simone-Veil>> Diunduh pada tanggal 28 Maret 2011 pukul 07.01

“Sondage: Quel Président de La République en 2012?” *Présidentielle 2012*.

19 Desember 2010. <<http://www.presidentielle-2007.net/sondage-quel-president-en-2012---45.php>> Diunduh pada tanggal 21 Maret 2011 pukul 15.43

“Union Féminine Civique et Sociale.” *Bibliothèque Universitaire d’Angers*.

<[http://bu.univangers.fr/index.php?S\\_file=archives/fiche.php&ref\\_archive=31](http://bu.univangers.fr/index.php?S_file=archives/fiche.php&ref_archive=31)> Diunduh pada tanggal 5 Juli 2011 pukul 15.56

“Un record historique.” *Le Journal des Femmes*.

<<http://www.journaldesfemmes.com/carriere/0706-femmes-assemblee/record-historique.shtml>> Diunduh pada tanggal 23 Maret 2011 pukul 15.51

## BIOGRAFI PENULIS



Cininta Aryadini lahir di Solo (Jawa Tengah), pada tanggal 22 Juli 1988. Ia menyelesaikan pendidikannya, dari TK hingga SMA, di Solo. Pada tahun 2006, Cininta meneruskan pendidikan tinggi di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, mengambil program studi Prancis. Selain aktif kuliah, ia juga aktif di Badan Otonom Pers, Suara Mahasiswa Universitas Indonesia, sejak tahun 2008. Cininta adalah reporter di Suara Mahasiswa. Pada tahun 2009 ia menjabat sebagai wakil pimpinan redaksi buletin Gerbatama, terbitan Suara Mahasiswa.